

**KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM  
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASCAPUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**DISERTASI**  
**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat**  
**Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam**



**Oleh**

**Moh. Asyiq Amrulloh**  
**NIM. F23416148**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

N a m a : Moh. Asyiq Amrulloh

NIM : F23416148

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2020

Saya yang menyatakan

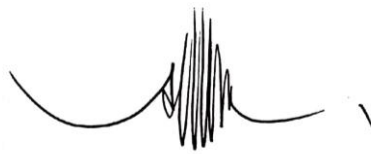


Moh. Asyiq Amrulloh

## **PERSETUJUAN PROMOTOR**

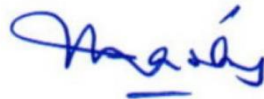
Disertasi berjudul “Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” yang ditulis oleh Moh. Asyiq Amrulloh ini telah disetujui pada tanggal 26 Juni 2020

Oleh:  
**PROMOTOR**



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.

**PROMOTOR**


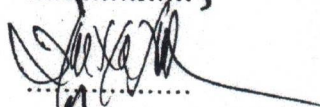
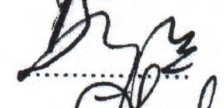


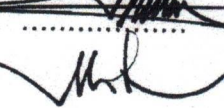
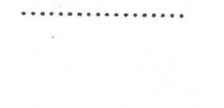


Prof. H. Masdar Hilmy, M.A., Ph. D.

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

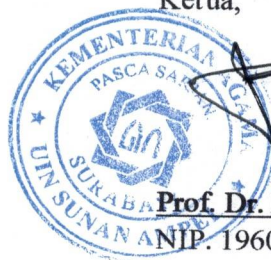
Disertasi berjudul “RESISTANSI TERHADAP FIKIH PATRIARKI (Studi *Baḥth al-Masā’il* Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Timur)” yang ditulis oleh Moh Shofiyul Huda MF, M.Ag. ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 13 Maret 2020


### Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua Penguji) 
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I. (Sekretaris/Penguji) 
3. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LL.M. (Promotor/Penguji) 
4. Dra. Hj. Wahidah Zein Br. Siregar, MA, Ph.D (Promotor/Penguji) 
5. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. (Penguji Utama) 
6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji) 
7. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Penguji) 

Surabaya, ..... 2020

Ketua,



  
**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.**  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Asyiq Amrulloh  
NIM : F23416148  
Fakultas/Jurusan : Doktor Studi Islam  
E-mail address : mohasyiq71@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2022

Penulis

( Moh. Asyiq Amrulloh )



















anak itu. Selain itu, anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari bapak biologisnya dan keluarga bapak biologisnya.

Dengan ketentuan hukum di atas, bagi sebagian orang, ada ketidakadilan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ibunya juga dirugikan karena hanya dia yang bertanggung jawab, sedangkan bapak biologisnya bebas dari tanggung jawab, padahal kelahiran anak akibat dari perbuatan keduanya (ibu dan bapak biologisnya), yakni bertemunya sel telur dengan sperma. Karena kelahiran anak di luar kawin akibat perbuatan kedua pihak (laki-laki dan perempuan), semestinya keduanya bertanggung jawab akan nasib anak tersebut.

Berkenaan dengan persoalan anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, tepatnya tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan ini diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica bin H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Pemohon memohon kepada MK agar berkenan memberikan putusan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945; Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.









banyak perbedaan pendapat. Di samping itu, sebagai produk pemikiran ulama klasik, isi kitab-kitab itu banyak yang tidak dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia. Dengan realitas itu, umat Islam di Indonesia membutuhkan acuan baku hukum Islam yang dapat memenuhi tuntutan, yakni KHI. Meskipun KHI bukan berupa undang-undang dan hanya berupa Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, KHI dijadikan pegangan para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara. Dengan demikian, secara formal KHI berlaku sebagai hukum materiil di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia.

Sebelum munculnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, persoalan kedudukan dan hak anak luar kawin selalu mengacu pada ketentuan yang ada dalam KHI. Ketentuan anak luar kawin dalam KHI sejalan dengan ketentuan yang ada dalam kitab fiqh klasik yang dipegang teguh umat Islam Indonesia. Ketentuan itu dianggap baku dan final. Namun, dengan adanya putusan MK yang bertentangan dengan ketentuan KHI, para hakim, khususnya, dan umat Islam, pada umumnya, menghadapi persoalan hukum seputar anak luar kawin.

Dari paparan di atas, ada beberapa kemungkinan persoalan yang muncul dalam penelitian ini yang meliputi (1) ketentuan anak luar kawin dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang baku atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi; (2) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bersebarangan dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi pegangan umat Islam di Indonesia (KHI); (3) Terjadi kevakuman hukum seputar anak luar kawin dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010; (4) Putusan MK Nomor

















Teori *al-maṣlahah al-Ṭūfī* dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer yang sangat kompleks, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perubahan sosial dan perkembangan peradaban, persoalan-persoalan baru muncul dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan berpegang teguh pada pemahaman literal (kebahasaan). Jika tetap berkuat pada pemahaman literal dan tidak mempertimbangkan pendekatan *al-maqāṣid*, hukum Islam menjadi statis dan tidak dapat menjawab tantangan zaman.

Meskipun teori *al-maṣlahah al-Ṭūfī* dapat dijadikan pertimbangan penyelesaian hukum, teori ini perlu dipadukan dengan perkembangan teori *al-maqāṣid* dalam nuansa kontemporer. Muḥammad al-Ṭāhir b. ‘Ashūr berupaya untuk mengembangkan teori *al-maqāṣid* sesuai dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Misalnya, term “pelestarian keturunan” menjadi bagian dari sebuah teori *al-maqāṣid* dengan mengembangkan pada keluarga. Perhatian akan keluarga menjadi salah satu tujuan pokok hukum Islam.<sup>27</sup> Teori *al-maqāṣid* dalam nuansa kontemporer dapat melengkapi kekurangan teori *al-maqāṣid* klasik dalam menghadapi persoalan kemanusiaan kontemporer.

Menurut Jasser Auda, teori *al-maqāṣid* klasik tidak memerinci cakupannya sehingga tidak bisa menjangkau persoalan-persoalan tertentu; teori *al-maqāṣid* klasik hanya berkenaan dengan kemaslahatan individu dan tidak mengarah pada kemaslahatan umum (publik); *al-maqāṣid* klasik tidak mencakup nilai-nilai dasar

---

<sup>27</sup> Muḥammad al-Ṭāhir b. ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), 79.

dan universal, seperti keadilan dan kebebasan; *al-maqāṣid* klasik dideduksi dari kajian literatur fiqh dan tidak berasal dari sumber-sumber orisinal (*naṣ*).<sup>28</sup>

Dengan berdasarkan pada paparan teori *al-maqāṣid* di atas, penelitian ini menggunakan teori *al-maqāṣid* kontemporer dengan sejumlah argumentasi. Pertama, persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer tidak bisa didekati lagi dengan teori klasik yang sesuai dengan zamannya dan belum tentu sesuai dengan perkembangan sosial dan zaman. Kedua, teori *al-maqāṣid* klasik memiliki kekurangan sebagaimana diuraikan di atas sehingga perlu dilengkapi dengan pengembangan teori *al-maqāṣid* kontemporer. Ketiga, teori *al-maqāṣid* kontemporer memperluas jangkauan *al-maqāṣid* (yang sebelumnya hanya mencakup hal primer [keniscayaan], sekunder [kebutuhan], dan pelengkap [keindahan]) dengan menambah hal baru, misalnya keadilan, universalitas, dan kesetaraan. Keempat, teori *al-maqāṣid* kontemporer berorientasi pada wilayah yang lebih luas yang berkaitan dengan persoalan masyarakat dan bangsa daripada persoalan individu. Kelima, yang sangat mendasar dalam *al-maqāṣid* kontemporer adalah deduksi langsung dari *naṣ* (al-Qur'an dan Hadis) dan bukan mengambil langsung dari khazanah fiqh madhhab. Dengan mengambil langsung dari *naṣ*, persoalan historisitas ajaran fiqh klasik yang dianggap baku dapat diatasi dan dilampaui dalam menghadapi persoalan baru, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan sosial.

---

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 4.



Nur A. Fadhil Lubis mengungkapkan bahwa KHI melalui Instruksi Presiden adalah suatu tonggak yang sangat penting berjalannya sejarah hukum Islam dan hukum nasional yang ada di Indonesia. Dia mengkaji KHI dari pendekatan sosio-legal yang mengintegrasikan perspektif legal formal dan sosiologis politis.<sup>31</sup> Buku Nur A. Fadhil Lubis secara umum mengkaji persoalan KHI sebagaimana diungkap dua buku di atas. Hanya saja, Nur A. Fadhil Lubis menegaskan kajiannya dengan pendekatan sosio-legal, sedangkan penelitian ini mengkaji materi KHI, khususnya anak luar kawin, dengan pendekatan sosio historis dan *uṣūl al-fiqh*, dengan menerapkan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

Muhammad Abdun Nasir menggunakan pendekatan sosio-historis dalam penelitian tentang positivisasi KHI. Menurutnya, KHI merupakan “hukum Islam Indonesia” yang diformulasi melalui prosedur dan metode. KHI menampilkan bentuk hukum yang reformatif dengan membuat ketentuan yang tidak sama, bahkan berlawanan dengan fiqh, sebagai usaha untuk mempertemukan realitas keindonesiaan.<sup>32</sup> Demikian juga kajian Mohammad Daud Ali. Dia mengemukakan bahwa penyusunan KHI mempertimbangkan “kemaslahatan”. Dengan demikian, KHI dapat mewedahi aspirasi hukum dan keadilan masyarakat, serta mampu berkontribusi sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat Islam yang ada di Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995).

<sup>32</sup> Muhammad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004).

<sup>33</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

Yahya Harahap mengkaji pendekatan perumusan KHI. Menurutnya, KHI dirumuskan dari *naş*, tetapi tidak secara langsung mengambil suatu *naş* menjadi rumusan yang praktis dan sudah siap pakai. KHI digodok agar menjadi formulasi hukum yang lebih matang yang berdimensi rasional, aktual, dan praktis. Dengan rumusan yang rasional, aktual, dan praktis, KHI dapat didayagunakan dan mudah dipahami umat Islam.<sup>34</sup> Dengan demikian, KHI dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menerapkan hukum Islam di Indonesia.

Meskipun tiga kajian (dua buku dan satu artikel dalam jurnal) di atas mengungkap metode dan pendekatan dalam merumuskan KHI, ketiga kajian itu tidak menjelaskan bagaimana metode dan pendekatan itu digunakan. Adapun penelitian ini mengkaji secara mendalam ketentuan anak luar kawin dalam KHI dengan menerapkan teori *maqāsid al-sharī'ah* dan menghubungkan dengan Putusan MK tentang anak luar kawin.

Berbeda dengan hasil kajian-kajian di atas, A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa KHI tidak bisa dikategorikan sebagai hukum tertulis. Meskipun demikian, untuk mengatasi kekosongan hukum, KHI dapat dijadikan pegangan oleh umat Islam di Indonesia. Dia juga tidak setuju dengan formulasi KHI yang sama dengan hukum tertulis.<sup>35</sup> Meskipun Attamimi berbeda dengan kajian-kajian di atas, Attamimi memfokuskan pada posisi KHI dalam tata hukum Indonesia sebagaimana kajian-kajian di atas.

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 5, Thn III (1992).

<sup>35</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-Undangan Indonesia", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. Amrullah Ahmad, et al. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Kajian tentang KHI juga dilakukan melalui penelitian lapangan. Achmad Gunaryo melakukan penelitian tentang pergumulan politik dan hukum Islam. Dalam kajiannya, dipaparkan proses penyusunan KHI dan penerapannya, serta ditemukan bahwa para hakim muda di lingkungan Pengadilan Agama yang mempunyai pemikiran pragmatis dan memiliki orientasi kepada undang-undang dalam menerapkan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menggunakan KHI daripada kitab-kitab fiqh.<sup>36</sup> Penelitian Gunaryo hanya mengungkap penguatan peran politik yang memfasilitasi formalisasi hukum Islam.

Euis Nurlaelawati melakukan penelitian tentang KHI dan penerapan hukum di Peradilan Agama. Dia mengungkapkan bahwa meskipun sebagai teks legislasi, KHI masih merupakan teks “terbuka”. Karakter “terbuka” dikaitkan dengan teks fiqh. Teks-teks fiqh telah begitu dilembagakan dalam komunitas Muslim Indonesia sehingga tidak mungkin KHI menggantikan sepenuhnya. Ambivalensi terhadap KHI terjadi pada hakim dan masyarakat luas. Ambivalensi hakim ditunjukkan oleh ketekunan mereka dalam mengutip teks-teks fiqh untuk memutus perkara, sedangkan posisi ambivalen masyarakat ditunjukkan dalam sikap bahwa peradilan agama berurusan dengan persoalan administrasi murni.<sup>37</sup> Penelitian Nurlaelawati ini hanya memfokuskan pada penerapan KHI di peradilan agama.

---

<sup>36</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

<sup>37</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

Secara keseluruhan, kajian-kajian di atas ditujukan untuk mengungkap latar belakang KHI, kedudukan, dan penerapannya. Kajian-kajian tersebut tidak mengkaji secara mendalam ketentuan-ketentuan KHI, khususnya persoalan anak luar kawin. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut dapat dijadikan sumber pendukung penelitian ini dalam memahami situasi dan kondisi ketika ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI disusun.

Ada beberapa kajian yang memfokuskan pada persoalan anak luar kawin. Fathurrahman Djamil mengkaji pengakuan anak luar kawin dan akibat hukumnya. Dia mengkaji persoalan ini dari perspektif fiqh klasik. Menurutnya, anak yang lahir akibat zina tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki yang berzina itu. Hubungan dalam hal ini adalah hubungan nasab, waris, dan perwalian dalam nikah. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Menurutnya, ketentuan ini sudah berkembang subur dalam masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam menyusun peraturan perundang-undangan, para ahli hukum, baik di legislatif maupun di eksekutif, disarankan mengindahkan ketentuan (norma dan kaidah) hukum ini.<sup>38</sup>

Amir Syarifudin juga mengkaji persoalan anak zina. Menurutnya, anak yang lahir akibat zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang berzina dengan ibu anak itu karena tidak ada *firāsh*. *Firāsh* hanya terjadi akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil dari zina tidak memiliki hubungan apa pun dengan laki-laki yang menikahi

---

<sup>38</sup> Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).







Chatib Rasyid mempertahankan Pasal 100 KHI dan berupaya memahami anak di luar perkawinan dengan membatasi pada anak yang dilahirkan dari pernikahan menurut agama, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; secara materiil, perkawinan tersebut sah, tetapi secara formil tidak sah. Anak zina tidak termasuk dalam ketentuan itu. Dia dengan tegas menolak pengertian anak yang dilahirkan di luar perkawinan sama dengan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan, yang biasa disebut anak zina karena kalau pengertian ini yang dipakai berarti anak yang dilahirkan di Indonesia dianggap sebagai anak sah semuanya dan perkawinan tidak lagi memerlukan undang-undang; kalau begitu yang terjadi, tsunami telah melanda hukum perkawinan di Indonesia.<sup>44</sup> Syamsul Anwar dan Isak Munawar mengkaji Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mereka mengulas bahwa Putusan MK itu memunculkan ketentuan normatif yang memicu pada ketidaktertiban dan ketidaktaatan hukum bagi masyarakat, melainkan berusaha mengabsahkan suatu akibat dari perbuatan yang ilegal.<sup>45</sup>

Meskipun kajian-kajian di atas dilakukan setelah munculnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, para pengkaji mempertahankan ketentuan anak luar kawin yang terdapat dalam KHI. Mereka tidak melakukan pengkajian secara mendalam Putusan MK itu dan tidak menganalisis peluang perubahan KHI

---

<sup>44</sup> Chatib Rasyid, *Memahami Makna Anak Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010*, Makalah, pada Seminar Nasional, Tanggal 30 April 2012, BKOW Provinsi Jawa Tengah.

<sup>45</sup> Syamsul Anwar dan Isak Munawar, "Nasab Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan", dalam <http://badilag.net/artikel/10609-nasab-anak-di-luar-perkawinan-paska-putusan-mahkamah-konstitusi--drs-h-syamsul-anwar-sh-mh-dan-drs-isak-munawar-mh-164.html>; diakses tanggal 18 Maret 2018.

dengan adanya perkembangan teknologi dalam menetapkan asal usul anak dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia.

Rio Satrio juga mengkaji anak luar kawin pasca-Putusan MK. Hasil kajiannya, ketentuan anak luar kawin tetap mengikuti ketentuan agama tentang nasab anak, tetapi anak luar kawin harus mendapatkan perlindungan dengan tanggung jawab ibu dan bapak biologisnya. Kajian Satrio ini hanya membatasi persoalan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, tentang Perkawinan dan tidak mengkaji ketentuan anak luar kawin dalam KHI.<sup>46</sup>

Sama halnya dengan Rio Satrio, Bambang Ali Kusumo juga mengkaji hak anak luar kawin dalam Putusan MK. Hasil kajiannya, anak luar kawin dari kawin sirri dianggap anak sah berdasarkan Putusan MK tersebut. Yang menjadi perdebatan adalah persoalan anak luar kawin dari perzinaan; oleh karena itu, untuk melindungi anak hasil perzinaan, perlu dibuat sebuah aturan hukum melalui peraturan pemerintah.<sup>47</sup> Kajian Kusumo ini sama sekali tidak memaparkan bagaimana ketentuan anak luar kawin yang ada dalam KHI pasca-Putusan MK.

Kajian yang menghubungkan Putusan MK tentang anak luar kawin dengan KHI adalah kajian yang dilakukan Candraditya Indrabajra Aziis dkk. Dalam kajiannya mereka menyimpulkan bahwa Putusan MK tentang anak luar kawin mempunyai implikasi terhadap KHI sehingga ketentuan anak luar kawin dalam KHI harus dikesampingkan. Kajian Aziis hanya mengkaji sepintas tentang

---

<sup>46</sup> Rio Satria, "Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin.pdf>; diakses tanggal 20 September 2018.

<sup>47</sup> Bambang Ali Kusumo, "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan Sirri dan Hak Anak Luar Kawin", dalam <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Explorasi/article/download/293/255>; diakses tanggal 25 September 2018.



Dalam persoalan implementasi Putusan MK tentang anak luar kawin, Nurhadi melakukan penelitian tentang implementasi Putusan MK tersebut terhadap Putusan Nomor 329 K/AG/2014. Hasil kajiannya, Putusan MK itu tidak dijadikan dasar Putusan Nomor 329 K/AG/2014, semestinya mengacu kepada Putusan MK yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>51</sup> Kajian Nurhadi berbeda dengan penelitian ini, yakni tidak mengkaji KHI meskipun menyinggung putusan MK tentang anak luar kawin.

Kudrat Abdillah dan Maylissabet mengkaji status dan hak anak luar kawin dalam perspektif sejarah sosial. Dalam kajiannya, mereka menegaskan bahwa Putusan MK yang berkaitan dengan anak luar kawin mengubah status dan hak anak luar kawin. Perubahan ketentuan ini merupakan sebuah terobosan hukum untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Mereka menyinggung ketentuan anak luar kawin dalam KHI.<sup>52</sup> Akan tetapi, kajian Kudrat tersebut tidak mengkaji secara mendalam konsekuensi hukum Putusan MK terhadap ketentuan anak luar kawin dalam KHI. Meskipun demikian, kajian ini dapat dijadikan pijakan dalam penelitian ini.

Seluruh kajian terdahulu di atas tidak mengkaji secara mendalam persoalan anak luar kawin dalam KHI dan tidak mengkaji konsekuensi hukum Putusan MK terhadap ketentuan anak luar kawin dalam KHI. Dengan adanya celah ini, penelitian ini mengkaji dan mengisi celah yang belum dikaji oleh para pengkaji sebelumnya, yakni konsekuensi hukum Putusan MK itu terhadap

---

<sup>51</sup> Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin (Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 2 (Agustus, 2018).

<sup>52</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media, 2020).







### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan lima tahapan. Pertama, sumber data yang sesuai dengan fokus penelitian ini diinventarisasi. Kedua, sumber data yang telah dikumpulkan dipilah dan dipilih menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder; sumber data primernya adalah KHI dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan sumber data sekundernya adalah literatur-literatur yang menunjang sumber data primer, yaitu literatur yang berisi tentang kedudukan dan hak anak luar kawin, literatur tentang teori *istinbāt al-ahkām*, serta literatur yang mengacu atau mengutip kepada sumber primer itu. Ketiga, KHI dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan kedudukan dan hak anak luar kawin dibaca (ditelaah). Di samping itu, literatur-literatur lain yang mengungkap aspek eksternal, yaitu tradisi intelektual, sosial, budaya, dan politik yang melingkungi dan mempengaruhi munculnya KHI dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga dibaca (ditelaah), dan demikian juga literatur tentang teori *istinbāt al-ahkām*. Keempat, isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian ini dicatat. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis (apa adanya) dalam bahan pustaka. Kelima, hasil catatan itu disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan data yang mengacu pada pertanyaan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Tahapan kelima pengumpulan data sebagaimana yang diuraikan di atas, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan beberapa unsur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sesungguhnya telah memasuki



kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang dilakukan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mengungkap latar belakang munculnya KHI dan kedudukan KHI dalam tata hukum Nasional. Selanjutnya, bab ini mengkaji ketentuan tentang kedudukan anak dalam KHI. Pengkajian tentang kedudukan anak mencakup anak sah, anak luar kawin, dan anak li'an. Dengan adanya ketentuan kedudukan anak dalam KHI, tiap-tiap anak mempunyai hak sesuai dengan kedudukannya. Oleh karena itu, bab ini mengkaji hak-hak anak sah, anak luar kawin, dan anak li'an. Pengkajian hak anak mencakup hak pemeliharaan (alimentasi), hak waris, dan hak perwalian dalam KHI.

Bab ketiga mengkaji Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bab ini diawali dengan mengemukakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bab ini memaparkan latar belakang munculnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, kemudian mengulas isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bab ini diakhiri dengan mengemukakan respons publik terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab keempat membahas konsekuensi hukum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap KHI berkenaan dengan kedudukan dan hak anak luar kawin. Bab ini diawali dengan mengkaji pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penetapan asal usul anak sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selanjutnya, bab ini menganalisis ketentuan nasab anak luar kawin dalam KHI dengan adanya Putusan MK Nomor





masyarakat dan ada dalam pandangan dan tafsiran para ulama yang diacu dari sumber hukum Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan kitab-kitab lainnya. Kondisi demikian menimbulkan munculnya beragam pandangan dan penafsiran dari para ulama dalam memutus suatu kasus atau mendamaikan kondisi yang ada di masyarakat. Kitab-kitab yang menjadi pegangan para ulama juga umumnya tidak hanya satu dan di antaranya sangat mungkin berasal dari *madhhab* yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan hukum yang sesuai dengan situasi yang ada.

Kondisi dilematis demikian juga dirasakan oleh para hakim di pengadilan agama hampir di seluruh wilayah Indonesia pascakemerdekaan. Para hakim agama yang kebanyakan menjadikan fiqh sebagai dasar pertimbangan mengalami kesulitan untuk memutus suatu perkara akibat tidak terkumpulnya hukum Islam tersebut dan berbedanya pandangan dan tafsiran setiap hakim terhadap muatan dalam hukum Islam tersebut. Umumnya, perkara yang masuk ke pengadilan agama dan membutuhkan landasan hukum Islam sebagai pertimbangan pengambilan keputusan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Hukum keluarga sering dikatakan sebagai inti syariat karena menjadi pintu masuk untuk mengupas lebih dalam tentang tata hidup umat Islam.<sup>4</sup> Diperjelas lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama umumnya perkara di

---

<sup>4</sup> Suardi Abbas, "Keberanjakan dari Konsep Konvensional ke dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2 (Juni, 2016), 27.











Alim Ulama.<sup>18</sup> Ketika semua persiapan telah selesai dilakukan, proses penyusunan KHI masuk tahap pengumpulan data.

Tahap pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penyusunan KHI. Di tahap ini data-data hukum Islam yang selanjutnya akan dirancang dan dikompilasi digali secara mendalam dan detail agar mendapat hasil yang valid saat dikompilasikan menjadi satu. Tahap pengumpulan data dipetakan menjadi berbagai jalur, seperti jalur kitab-kitab fiqh, jalur ulama, jalur yurisprudensi peradilan Agama, dan jalur studi perbandingan di negara-negara penganut hukum Islam, khususnya Timur Tengah.<sup>19</sup>

Jalur kitab-kitab *fiqh* merupakan jalur pengumpulan data yang ditempuh tim pelaksana proyek penyusunan KHI dengan bersumber dari kitab-kitab fiqh guna meramu hukum Islam agar dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Kitab-kitab yang dijadikan acuan pengumpulan data tim penyusunan KHI adalah kitab-kitab fiqh yang familiar dan berpengaruh di Indonesia, bahkan dunia.<sup>20</sup> Kitab-kitab tersebut berasal dari berbagai mazhab dengan jumlah 38 kitab yang ditelaah dan mencakup 160 masalah hukum keluarga.<sup>21</sup> Masalah hukum keluarga yang diangkat dalam lembar pertanyaan

---

<sup>18</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 65-66.

<sup>19</sup> Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985.

<sup>20</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), 59.

<sup>21</sup> Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 6, No. 1 (Juni: 2015), 31.





































memiliki pandangan yang seragam terkait bidang-bidang yang dibahas dalam KHI itu.

Jalur media massa menjadi jalur yang paling berperan dalam penyebarluasan dan pemasyarakatan KHI. Hal ini dikarenakan media massa menjadi perantara pembentukan opini masyarakat agar sesuai dengan norma substansial yang terkandung dalam KHI. Publikasi bebas hampir mirip dengan jalur pendidikan karena berupa penerbitan buku-buku saku yang disebarluaskan di sekolah-sekolah formal atau lembaga nonformal lainnya. Bahkan, penyebaran publikasi bebas ini lebih luas dibandingkan jalur pendidikan karena tidak hanya yang berada dalam area pembelajaran yang dapat memiliki buku saku KHI itu. Jalur penyebaran terakhir adalah jalur kalangan profesi, seperti hakim, konsultan hukum, pengacara, dan notaris. KHI diharapkan menjadi pedoman bagi para kalangan profesional saat itu dalam memecahkan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Keenam jalur tersebut menjadikan KHI dapat hidup di masyarakat.

Dengan adanya gerakan penyebarluasan KHI secara nasional di Indonesia, KHI menjadi akrab digunakan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat yang membutuhkan. KHI tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memecahkan dan memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan, kewarisan,



Seorang anak yang dilahirkan di muka bumi merupakan hasil dua insan yang saling bersatu dalam ikatan perkawinan. Sudah suatu kepastian bahwa setiap anak yang dilahirkan berasal dari pertemuan antara sel sperma milik ayahnya dan sel telur milik ibunya. Dari peristiwa itu dapat diketahui bahwa anak merupakan keturunan dari kedua orang tuanya yang membawa gen pewaris sifat dari kedua orang tuanya itu pula. Gen pewarisan sifat dari kedua orang tua tidak berhenti pada anak itu saja. Anak tersebut dapat terus menurunkan gen kedua orang tuanya kepada generasi berikutnya jika dia melakukan perkawinan. Hal ini memungkinkan terciptanya suatu garis keturunan keluarga yang besar dan panjang yang mempengaruhi hubungan keperdataan dan nasab dari keturunan-keturunan yang dihasilkan.

Hubungan keperdataan erat berbicara tentang hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait satu sama lain.<sup>74</sup> Ikatan yang saling berkait itu muncul sebagai akibat adanya hubungan darah, seperti hubungan darah orang tua dengan anaknya. Nasab pun diartikan demikian, yakni pertalian darah seseorang yang menentukan asal usul orang tersebut dan secara genetis dapat mempengaruhi tampilan fisik dari keturunannya.<sup>75</sup> Baik hubungan keperdataan dan nasab, keduanya dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya. Hak-hak tersebut adalah hak waris, hak perwalian, dan hak pemeliharaan. Adanya hak menimbulkan kewajiban, yakni kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya atau pun sebaliknya.

---

<sup>74</sup> Nurul Hak, "Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)" (Disertasi -- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 40.

<sup>75</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 173.

Hubungan keperdataan dan nasab akan menjadi rabun ketika anak yang dilahirkan tidak berasal dari suatu perkawinan yang sah secara agama maupun negara. Sangat disayangkan ketika anak yang tidak berdosa tersebut tidak mengetahui kejelasan status orang tuanya. Dalam hal ini adalah anak hasil perbuatan di luar ikatan perkawinan yang sah atau dikenal dengan sebutan anak luar kawin.

Beragam kasus kelahiran anak di luar perkawinan terjadi di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah bagi anak tersebut di kemudian hari. Ibu yang mengandung anak di luar perkawinan juga turut mengalami kesulitan dalam membesarkan anak tersebut. Stigma masyarakat terhadap anak yang lahir di luar perkawinan membawa dampak negatif terhadap psikologis anak tersebut. Tidak hanya itu, anak itu juga mengalami kehilangan hak dan kewajibannya terhadap ayah biologis. Hal ini diperburuk jika ayah biologisnya tidak mau mengakuinya sebagai anak biologis.

Permasalahan-permasalahan yang timbul terkait kedudukan dan hak anak, terutama anak luar kawin perlu menjadi perhatian negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Anak yang tidak mengetahui orang tuanya dapat dikategorikan sebagai anak yang perlu mendapat pemeliharaan oleh negara. Namun, hal itu bukan berarti semua anak di luar perkawinan langsung menjadi tanggungan negara. Negara dengan beragam tata perundang-undangannya wajib mengatur dan memperjuangkan kedudukan dan hak anak-anak luar kawin tersebut karena bukan suatu kesalahan dari anak tersebut berada pada posisi itu. Perbuatan kedua orang









menyapih adalah dua tahun atau sama dengan dua puluh empat bulan. Dalam Q.S. al-Aḥqāf (46):15 disebutkan bahwa total waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya seorang anak berada dalam kandungan ibunya selama enam bulan. Rentang waktu minimal selama enam bulan inilah yang disepakati oleh para ulama dalam menentukan kedudukan seorang anak yang dilahirkan menjadi anak sah, dan tentu saja berdampak pada penentuan nasab seorang anak kepada bapaknya.<sup>84</sup> Hubungan darah (nasab) inilah yang menjadi alasan kuat diketahuinya kedudukan anak tersebut.

Status dan kedudukan anak sah pada dasarnya adalah kondisi atau keadaan jelasnya nasab (hubungan darah) seorang anak dengan kedua orang tuanya tanpa terkecuali. Agama Islam tidak pernah bertindak diskriminatif terhadap setiap anak yang baru lahir karena kelahiran seorang anak merupakan fitrahnya sebagai insan di muka bumi. Namun, Islam secara tegas membagi anak dalam dua kategori berdasarkan hubungan nasab seorang anak dengan orang tuanya. Hal ini penting dan tegas diterapkan karena berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban akibat adanya hubungan nasab tersebut.

Ada dua kategori besar pembagian anak berdasarkan nasabnya yang tegas ditegaskan dalam Islam, yaitu anak *shar'ī* dan anak *ṭabi'ī*. Anak *shar'ī* adalah anak yang secara hukum memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, sedangkan anak *ṭabi'ī* adalah anak yang secara hukum dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya.<sup>85</sup> Anak *shar'ī* dapat dikatakan sebagai anak sah.

---

<sup>84</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 3.

<sup>85</sup> Imron Rosyadi, "Anak Sah dan Anak Luar Nikah serta Implikasinya dalam Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 19, Thn. VI (1995), 42.

Ada tiga kelompok kondisi suatu anak dikatakan anak *shar'ī* atau anak sah, yakni (1) anak yang dilahirkan suami-istri dari suatu perkawinan yang sah secara agama dan negara; (2) Anak yang dilahirkan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang *fāsid* sebelum diumumkan ke-*fāsid*-annya; dan (3) anak yang dilahirkan dari hubungan yang *shubhat*.

Poin nomor 1 terkait anak sah telah dijelaskan sebelumnya sebagai pengertian anak sah dalam KHI. Pengertian anak sah dalam kondisi demikian juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memuat pengertian anak sah dalam Pasal 250. Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Berdasarkan pengertian itu, dapat diketahui bahwa suatu anak mendapat kedudukan sebagai anak sah jika anak tersebut lahir dan berasal dari suatu hubungan perkawinan yang sah antara bapak dan ibunya. Tidak ada keraguan lagi karena anak tersebut memang memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya yang telah terikat hubungan perkawinan yang sah secara agama dan negara.

Poin nomor dua menyebutkan bahwa seorang anak dikategorikan anak sah ketika anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan suami-istri yang *fāsid* sebelum ke-*fāsid*-annya diputuskan. Perkawinan atau pernikahan *fāsid* dapat dimaknai sebagai perkawinan yang rusak karena secara etimologi berasal dari kata



waktu kelahiran janin dalam kandungan pihak perempuan sejak menjalin hubungan dengan pihak laki-laki selaku suaminya adalah minimal enam bulan atau lebih. Apabila perempuan itu melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih pascaberhubungan dengan laki-laki yang menjadi suaminya, anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya selaku bapak dari anak tersebut. Namun, jika anak yang dikandung perempuan itu dilahirkan kurang dari enam bulan, nasab anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki yang menjadi suami nikah *fāsid* ibunya. Hal itu merupakan gejala bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan bukanlah anak dari laki-laki yang menjadi suami sah nya, melainkan anak yang berasal dari laki-laki lain.

Kondisi penentuan nasab anak perlu diperhatikan pula ketika status pernikahan *fāsid* telah diputuskan ke-*fāsid*-annya. Adanya keputusan dari hakim bahwa pernikahan tersebut *fāsid* mengakibatkan pihak laki-laki dan pihak perempuan yang telah ber-*khalwat* atau *dukhūl* harus berpisah. Kedudukan anak hasil nikah *fāsid* ini perlu diperhatikan karena bisa jadi anak itu memiliki kedudukan sebagai anak sah yang tetap memiliki nasab dengan bapaknya atau bisa jadi anak tersebut memiliki kedudukan sebagai anak di luar kawin yang mengakibatkan anak tersebut hanya bernasab dengan ibunya dan tidak bernasab dengan bapaknya. Kondisi demikian dapat diputuskan setelah melihat situasi dan keadaan sebagai berikut. Jika pihak perempuan melahirkan anak sebelum melebihi batas maksimal kehamilan dari hari perpisahan pernikahan tersebut, anak yang dilahirkan memiliki nasab dengannya dan dengan pihak laki-laki sebagai bapaknya. Nasab anak tidak dihubungkan dengan pihak laki-laki tersebut jika









Perempuan yang hamil di luar nikah tidak terikat oleh perkawinan itu sehingga boleh melangsungkan pernikahan itu.

KHI juga mengatur dan memperbolehkan dilangsungkannya kawin hamil ini. Pasal 53 KHI menyebutkan “(1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.” Ketentuan tentang kawin hamil yang tertuang dalam KHI ini mengindikasikan telah adanya kesepakatan di antara ulama-ulama yang turut menyusun KHI untuk membolehkan kawin hamil perempuan yang melakukan zina atau korban pemerkosaan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Landasan hukum yang memperkuat diperbolehkannya kawin hamil ini juga datang dari hukum adat yang berlaku di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Daerah Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa mempertimbangkan dilakukannya kawin paksa atas laki-laki yang telah menghamili perempuan agar perempuan tersebut tidak menanggung penderitaan sendiri dan agar anak serta keluarganya tidak menanggung sanksi moral berkepanjangan dari masyarakat sekitar. Daerah-daerah tersebut memaksa dan memberikan sanksi terhadap laki-laki yang tidak mau melaksanakan kawin paksa karena seyogianya laki-laki tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan terhadap perempuan itu. Selain kawin paksa, ada pula kawin darurat yang dilakukan di beberapa daerah lainnya. Kawin darurat ini adalah proses mengawinkan















mengakibatkan anak itu berkedudukan anak sah dan bernasab dengan bapak dan ibu sahnya. Apabila saat kelahirannya hubungan perkawinan kedua orang tuanya telah terputus, anak itu tetap berkedudukan sebagai anak sah dan bernasab dengan bapak dan ibu sahnya. Hal itu berbeda dengan anak yang terbentuk dalam kandungan hasil perbuatan di luar perkawinan dan pelakunya terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Meskipun anak itu lahir dalam perkawinan yang sah (artinya ibu dari anak itu telah menikah di kemudian hari), kedudukan anak itu tetap saja sebagai anak luar kawin. Kasus pengecualian terjadi ketika perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengandung anak hasil hubungan di luar perkawinan kemudian kawin hamil dengan laki-laki yang menghamili, kedudukan anaknya menjadi anak sah.<sup>111</sup> Hal ini tertuang dalam KHI Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) tentang kawin hamil.<sup>112</sup> Kawin hamil dapat membuat kedudukan anak luar kawin menjadi anak sah.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam menentukan kedudukan anak menjadi anak luar kawin adalah melihat masa kehamilan anak yang dikandung. Batas minimal kelahiran anak menurut jumbuh ulama adalah enam bulan. Batas itu berdasarkan al-Qur'an, 46: 15 dan al-Qur'an, 31: 14. Dalam kedua ayat al-Qur'an itu dijelaskan bahwa total waktu mengandung dan menyapih anak adalah tiga puluh bulan dan untuk menyapih saja selama dua tahun atau dua puluh empat bulan sehingga masa mengandung adalah enam bulan.<sup>113</sup> Apabila anak yang dikandung lahir dalam waktu enam bulan atau lebih pascaperkawinan, anak

---

<sup>111</sup> Taufiq, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Mimbar Hukum*, No. 19, Thn. VI (1995), 38.

<sup>112</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

<sup>113</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 278.

















Dari ayat al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa asal muasal diucapkannya sumpah sebanyak empat kali itu akibat orang yang ingin meli'an tidak mempunyai saksi-saksi sejumlah empat orang untuk menjadi bukti atas perzinaan orang yang dili'an itu. Oleh karena itu, sumpah atas nama Allah swt. diucapkan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan benar sesuai apa yang disaksikan dan bukan merupakan tuduhan semata.

Sumpah sebanyak empat kali yang diucapkan oleh suami yang meli'an selanjutnya diikuti dengan dengan sumpah kelima yang berisi kata-kata bahwa orang tersebut akan mendapat laknat dari Allah swt. apabila tuduhan yang diajukan terhadap istrinya dan pengingkaran terhadap anaknya itu ternyata dusta. Kedua, istri menolak tuduhan atau pengingkaran yang diutarakan oleh suaminya itu dengan cara bersumpah sebanyak empat kali juga bahwa tuduhan dan/atau pengingkaran yang disebutkan suaminya tidak benar. Keempat sumpah yang dikatakan oleh pihak istri dilanjutkan dengan sumpah kelima yang berisi kata-kata bahwa murkanya Allah swt. akan menimpa dirinya (pihak istri) apabila tuduhan atau pengingkaran itu benar. Selanjutnya, dua tata cara yang telah disampaikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika proses li'an yang dilakukan oleh pihak suami tidak diikuti dengan li'an dari pihak istri, li'an tersebut dianggap tidak terjadi dan dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, proses li'an harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berseteru dan dilakukan dalam sidang di pengadilan agama.

Dampak disahkannya li'an adalah putusya ikatan perkawinan antara suami istri yang saling me li'an itu. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan itu



berjalannya waktu, anak itu akan melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain, khususnya kepada orang tuanya sendiri, yakni dengan cara memberi perawatan dan perlindungan yang sama seperti yang orang tuanya lakukan di saat dia kecil.

Pemenuhan hak anak oleh orang tuanya tidak hanya sebatas merawat, melindungi, dan menafkahi. Ada pula hak anak lainnya yang tidak kalah penting yang harusnya juga diterima oleh anak itu dari orang tuanya, yakni hak waris dan hak perwalian. Hak waris berkaitan dengan harta warisan yang akan diturunkan orang tua kepada anaknya dan hak perwalian berkaitan dengan posisi orang tua sebagai wali saat anak itu memasuki fase kehidupan yang baru, yakni membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan. Hak-hak itu menjadi hak fundamental yang seharusnya didapatkan oleh setiap anak yang terlahir ke dunia. Hanya saja dalam kehidupan nyata, banyak anak yang tidak sepenuhnya dapat menerima manfaat dari hak-hak yang seharusnya didaparkannya dari kedua orang tuanya. Hal ini berkaitan dengan status dan kedudukan anak itu di mata hukum negara dan hukum agama.

Status dan kedudukan seorang anak yang lahir dari kandungan seorang perempuan mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang didapat oleh anak tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di subbab sebelumnya bahwa ada tiga kelompok penyebutan anak berdasarkan status dan kedudukannya di mata hukum negara dan agama. Anak-anak itu adalah anak sah, anak luar kawin, dan anak li'an. Pemberian status dan kedudukan anak sah, anak luar kawin, dan anak li'an

didasarkan pada status perkawinan kedua orang tuanya yang mempengaruhi hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya itu.

Orang tua yang memiliki status perkawinan yang sah menurut agama dan negara membuat anak hasil hubungan suami istri itu disebut anak sah. Anak sah umumnya memperoleh keseluruhan hak-haknya, baik dari bapak maupun dari ibunya, tentang hak pemeliharaan, hak kewarisan, dan hak perwalian. Hak-hak itu diterima anak sah karena anak itu memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya tanpa terkecuali. Kondisi berbeda diterima oleh anak luar kawin. Anak luar kawin menurut KHI hanya memperoleh hak-haknya dari pihak ibu dan keluarga ibunya karena hanya terikat hubungan nasab atau pertalian darah dengan ibunya saja. Anak luar kawin tidak terikat hubungan nasab dengan bapak dan keluarga bapaknya karena telah terputus hubungan nasab itu sejak disandangnya status anak luar kawin oleh seorang anak.

Tidak adanya hubungan nasab dan keperdataan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya menyebabkan anak tersebut kehilangan hak dan kewajiban dari bapak biologisnya. Demikian pula, bapak biologisnya tidak berhak atas anak hasil hubungan di luar kawin tersebut. Tidak adanya hubungan timbal balik antara bapak dan anak itu dapat menjadi masalah bagi anak, bahkan ibu dari anak tersebut. Lepasnya hubungan nasab antara bapak dan anak menyebabkan lepas pula tanggung jawab yang diemban bapak untuk memelihara, mewarisi harta, dan menjadi wali dari anak yang dimaksud. Akibatnya, ibu dari anak itu menanggung beban sendiri untuk membesarkan anak luar kawin itu. Tidak hanya itu, anak luar kawin umumnya mengalami kesulitan untuk mencatatkan

kelahirannya akibat tidak adanya nama bapaknya. Dibutuhkan proses yang lebih panjang dan rumit yang harus ditempuh jika anak itu ingin membuat akta kelahiran tanpa nama bapak.

Dari segi sosiologis dan psikologis, anak luar kawin juga sering mendapat panggilan dan perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat di lingkungan sekitarnya akibat perbedaan kedudukan antara anak luar kawin dengan anak sah. Masyarakat Indonesia berpandangan bahwa hubungan seksual di luar nikah sebagai perbuatan yang melanggar norma masyarakat dan agama, sehingga anak hasil perbuatan itu juga cenderung dikucilkan dari masyarakat.

Masalah-masalah yang sering diterima anak luar kawin akibat perbuatan orang tuanya tidaklah adil bagi anak itu. Agama Islam hanya ingin memperjelas nasab antara seseorang orang dengan keturunannya, bukan untuk memberi masalah dan ketidakadilan terhadap keturunan yang dihasilkan. Namun, dampak dari kehilangan hubungan nasab anak luar kawin dengan bapak biologis yang menaruh benih dalam rahim ibu anak luar kawin itu berdampak besar terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut, termasuk respons publik terhadap keberadaan anak hasil hubungan di luar perkawinan itu. Oleh sebab itu, hukum Islam sangat berhati-hati dalam mengategorikan seorang anak yang lahir menjadi anak luar kawin karena berkaitan dengan hak dan kewajiban yang akan diterima anak itu.

Anak li'an memiliki status dan kedudukan yang sejajar dengan anak luar kawin. Meskipun anak li'an lahir dalam perkawinan yang sah, ada pengingkaran dari laki-laki yang menjadi suami ibu anak li'an terhadap asal usul anak itu yang menyebabkan anak li'an kehilangan kedudukannya sebagai anak sah. Suami dari



Dengan demikian, anak sah, anak luar kawin, dan anak li'an berhak mendapat hak-haknya, seperti hak pemeliharaan (alimentasi), hak perwalian dari orang tuanya, selama anak itu belum bisa dikatakan mandiri, hak waris, baik dari ibu atau bapak, atau dari keduanya. Berikut ini akan dijelaskan dan dipaparkan tentang hak pemeliharaan (alimentasi), hak waris, dan hak perwalian yang akan didapatkan oleh seorang anak.

#### **a. Hak Pemeliharaan**

Hak mendasar yang harus diterima oleh setiap anak adalah hak pemeliharaan (alimentasi) dari orang tuanya. Setiap anak yang baru lahir belum memiliki daya atau kemampuan apa pun untuk memelihara dirinya sendiri agar dapat bertahan hidup. Peran orang tua dari anak itulah yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan anak itu. Orang tua yang memiliki anak wajib memenuhi hak pemeliharaan terhadap anaknya karena pada dasarnya hak pemeliharaan berkaitan dengan kegiatan memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya". Makna "memelihara" dalam ketentuan di atas adalah memberikan kesejahteraan kepada anak dan memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari gangguan fisik maupun mental yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak





agamanya”. Peran pemeliharaan yang diemban orang tua menurut hukum Islam (tercantum dalam KHI) tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik dan mental anak, tetapi juga berkenaan dengan pengembangan kecerdasan anak terutama peningkatan pengetahuan tentang ilmu agama. Seorang anak diharapkan dapat hidup layak, wajar, dan cerdas secara emosional dan spiritual sehingga dapat menjadi manusia yang dapat membedakan mana yang haq dan mana yang batil.

KHI tidak hanya memuat tentang subjek yang berperan dalam pemenuhan hak pemeliharaan anak. KHI juga memuat beberapa hal yang berhubungan dengan pemeliharaan itu. Hal itu dibuktikan dengan tercantumnya bab pemeliharaan anak dalam KHI, tepatnya pada Bab XIV Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3). KHI Pasal 98 ayat (1) menyebutkan, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Dari sini dapat diketahui bahwa KHI memuat dan menyebutkan dengan jelas kapan pemenuhan hak pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak berakhir. Anak yang memiliki cacat fisik ataupun mental berpotensi untuk tetap memperoleh hak pemeliharaan dari orang tuanya hingga akhir hayatnya jika anak itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akibat terhalang cacat tersebut.

Batas waktu orang tua dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak pemeliharaan (alimentasi) terhadap anak-anaknya termuat pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (2)



watak seorang perempuan cenderung lebih halus, santun, pemurah, dan penyanyang sehingga diharapkan anaknya pun akan merasakan cinta kasih seorang ibu dalam fase pemeliharaannya itu. Setelah anak berumur 12 tahun, atau sudah mumayyiz, anak itu dapat memilih siapakah yang akan memiliki hak pemeliharaannya, baik itu bapak atau ibunya. Namun, terlepas dari hak pemeliharaan, bapak dari anak itu harus tetap menanggung biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu biasanya telah disepakati saat persidangan perceraian berlangsung agar di kemudian hari tidak terjadi masalah akibat tidak pastinya besaran biaya pemeliharaan yang akan diberikan bapak kepada anaknya. Ketentuan itu tercantum dalam KHI Pasal 156 d, “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Terlepas dari ada atau tidaknya perceraian orang tua, seorang anak yang belum memenuhi batas usia bisa mengurus diri sendiri berhak mendapat perwakilan dari orang tuanya dalam segala perbuatan hukum bila terjadi sesuatu. Hal itu disebutkan dalam KHI Pasal 98 ayat (2), “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. KHI Pasal 98 ayat (3) menambahkan, “Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.” Jika orang tua tidak dapat menunaikan kewajibannya, dapat ditunjuk kerabat dekat dari orang tersebut. Urutan kerabat dekat yang dapat ditunjuk untuk memenuhi kewajiban pemeliharaan anak adalah wanita-wanita dari garis ibu mulai dari nenek, saudara, bibi, baru wanita-wanita





maupun anak li'an, wajib memberikan hak pemeliharaan kepada anaknya yang meliputi hak pemeliharaan, perawatan, perlindungan, pendidikan, dan penafkahan atau pembiayaan hingga anak itu cukup umur, cukup dewasa, dan cukup mandiri untuk berdiri sendiri menghidupi dirinya. Tindakan sebaliknya juga dilakukan oleh anak jika anak itu telah memiliki kemampuan untuk merawat, memelihara, dan melindungi orang tuanya itu. Bahkan, pemenuhan hak saling memelihara satu sama lain itu tidak terbatas waktu jika kedua belah pihak itu ingin terus saling memelihara, merawat, melindungi, dan memberi penghidupan satu sama lain.

#### **b. Hak Waris**

Suatu keluarga yang terdiri dari orang tua, anak, bahkan hingga keturunannya ke bawah memiliki hak dan kewajiban untuk saling waris-mewarisi harta yang dimiliki. Waris menjadi hak sekaligus kewajiban yang timbul dari adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris. Waris ini dihimpun dan diatur dalam sistem hukum yang disebut hukum kewarisan agar dalam proses pembagian dan penerimaannya tidak terjadi masalah.

Bagi umat Islam di Indonesia, salah satu sumber rujukan yang dapat dijadikan pegangan tentang hukum kewarisan adalah Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan. Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan memuat ketentuan umum dan pasal demi pasal yang berhubungan dengan kewarisan. Ketentuan umum yang termuat dalam Pasal 171 Buku II KHI berisi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, dan jenis-jenis harta yang ditinggalkan.



perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maksud dari pengertian itu adalah seseorang dapat dikatakan ahli waris jika memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggalkan harta warisannya. Hubungan darah atau hubungan perkawinan tidak cukup untuk menjadikan orang tersebut sebagai ahli waris. Orang yang menjadi ahli waris itu juga harus beragama Islam dan tidak terhalang hukum yang berlaku saat dia ditetapkan sebagai ahli waris dari harta-harta yang dimiliki oleh pewaris. Jika seorang pewaris memiliki hubungan darah dengan anaknya, tetapi anaknya tidak beragama Islam, anak itu tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris tersebut karena tidak memenuhi ketentuan sebagai ahli waris, yakni harus beragama Islam juga sama seperti halnya pewaris. Ketentuan itu diperlejas lagi dalam KHI Pasal 172 yang berbunyi, “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Makna tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dalam Pasal 171 huruf c KHI itu adalah seseorang yang akan menjadi ahli waris tidak sedang bermasalah dengan hukum kaitannya mencederai pewaris. Pasal 173 KHI membahas tentang hal tersebut, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang



diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.” Berdasarkan hal itu, seorang ahli waris dapat saja dicabut kedudukannya sebagai ahli waris jika dia dipersalahkan atas hukum akibat perbuatannya sendiri terhadap pewaris.

Orang-orang yang tergolong ahli waris adalah orang-orang yang masuk dalam satu di antara kelompok hubungan pewaris dengan ahli waris berikut, yakni hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan pelepasan budak (*al-wala'*).<sup>142</sup> Seseorang dapat dikatakan ahli waris jika dia memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris yang telah meninggal dunia tersebut. Golongan orang-orang yang masuk ahli waris berdasarkan hubungan darah itu termuat dalam KHI Pasal 174 ayat 1 huruf a, yakni kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan Pasal 174 ayat 1 huruf b memuat kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan perempuan, yakni ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek.

Ahli waris dapat pula berasal dari adanya hubungan perkawinan antara ahli waris itu dengan pewaris. Ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan ini menandakan ahli waris itu adalah orang yang secara agama dan negara terikat dalam perkawinan yang sah dengan pewaris dan sejak meninggalnya pewaris orang itu bergelar duda atau janda. KHI Pasal 174 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Di antara banyaknya daftar hubungan darah dan perkawinan yang

---

<sup>142</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 97.

dicantumkan dalam ayat sebelumnya, KHI Pasal 174 ayat 2 memperjelas siapa-siapa orang yang paling berhak menjadi ahli waris atas warisan yang ditinggalkan pewaris. KHI Pasal 174 ayat 2 berbunyi, “Apabila semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.” Orang-orang itulah yang diutamakan untuk menjadi ahli waris pascameninggalnya pewaris.

Hubungan darah anak dengan orang tuanya, pewaris dengan ahli warisnya ini berkaitan erat dengan nasab dan keperdataan. Hubungan darah seseorang mempengaruhi status dan kedudukan orang itu di mata hukum agama dan negara. Ahli waris terutama anak memiliki hubungan darah berupa nasab dan keperdataan kepada pewaris yang meninggal dunia. Kedudukan anak itu mempengaruhi porsi atau bagiannya dalam mendapat waris dari pewaris tersebut. Kedudukan anak yang dimaksud berkaitan dengan status atau gelar yang disandang anak itu, yakni anak sah, anak luar kawin, atau anak li’an.

Anak sah adalah ahli waris sah dari seorang pewaris karena memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan orang yang menjadi pewaris. Dalam hal ini pewarisnya adalah orang tuanya sendiri. Adanya hubungan nasab anak sah dengan bapak dan ibu kandungnya mengakibatkan anak sah berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Masing-masing dari kedua orang tuanya wajib memberikan anak sah selaku ahli waris porsi harta yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan. Ada perbedaan porsi yang didapat oleh setiap anak dalam setiap keluarga.

Perbedaan porsi itu didasari atas perbedaan jenis kelamin anak dan jumlah anak yang dimiliki keluarga tersebut, serta kondisi dan jumlah anggota keluarga

yang masih hidup dan berhak menjadi ahli waris. Jika pewaris meninggalkan seorang anak perempuan, anak perempuan itu selaku ahli waris akan mendapat setengah bagian dari harta warisan pewaris. Berbeda halnya jika dalam keluarga tersebut terdapat beberapa anak dan ada pula anak laki-laknya, anak laki-laki itu mendapat jatah dua kali lebih banyak dibandingkan anak perempuan dalam keluarga itu. Ketentuan itu diatur dalam KHI Pasal 176 yang berbunyi, “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Bagian anak laki-laki yang mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan didasarkan pada al-Qur'an Surat an-Nisa, 4: 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Dengan demikian, anak laki-laki memiliki tugas ganda, yakni melindungi keluarganya dan memberi nafkah keluarganya yang mengakibatkan dirinya berhak atas dua bagian lebih banyak dari anak perempuan. Pembagian terkait harta warisan yang dimiliki pewaris kepada para ahli waris selain anak sahnyanya dicantumkan dalam KHI Pasal 177 sampai Pasal 182.

Kondisi berbeda akan diterima anak luar kawin terkait hak waris. Anak luar kawin hanya mendapat hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja







orang yang menjadi wali dari anak itu menyebabkan dibutuhkan orang yang cakap dan berkemampuan atas itu untuk menjadi wali anak.

Wali seorang anak umumnya adalah orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan anak itu atau yang diberikan kewenangan atas hal tersebut. Orang tua dari anak itu pada dasarnya dapat menjadi wali dari anaknya sendiri. Hanya saja, untuk kasus yang berkaitan dengan perbuatan hukum, tidak semua orang tua memiliki kecakapan atas itu sehingga dibutuhkan orang lain yang memang paham dan kompeten. Oleh karena itu, KHI turut serta mengatur hak perwalian seorang anak agar hak anak tetap dapat diperjuangkan dan diberikan.

KHI membahas perwalian mulai dari definisi perwalian itu sendiri. Definisi tentang perwalian dicantumkan dalam Ketentuan Umum KHI Pasal 1 huruf h. Pasal 1 huruf h KHI menjelaskan, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.” Perwalian ini berkaitan dengan penyerahan kewenangan dari orang tua kepada orang lain yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak itu sendiri.

Seseorang yang dapat memperoleh hak perwalian ini adalah seorang anak yang masih masuk rentang usia yang ditentukan dalam KHI. KHI Bab XV tentang Perwalian Pasal 107 ayat (1) menyebutkan, “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Anak yang belum berusia 21 tahun dianggap sebagai anak yang







tinggalnya. Dengan demikian, posisi bapak kandung dan keluarga bapak sangat penting dalam menjadi wali saat anak perempuannya menikah.

Untuk anak yang berstatus anak sah, tidak terjadi masalah ketika dia membutuhkan perwalian atas dirinya sendiri saat akan menikah. Anak perempuan sah itu memiliki ikatan pertalian darah atau hubungan nasab dengan bapak dan keluarga bapaknya sehingga bagaimanapun dapat diupayakan untuk menggunakan wali nasab sebagai wali nikah di hari pernikahannya. Kondisi berbeda didapati anak perempuan yang menyandang status anak luar kawin. Anak luar kawin, menurut KHI, tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya dan hanya bernasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika kondisi ini terjadi, orang yang berwenang menjadi wali nikah anak itu adalah wali hakim. Hal ini dikarenakan tidak berhaknya bapak biologis atau keluarga bapak biologis itu untuk menjadi wali nikah anak perempuan yang berstatus luar kawin akibat tidak adanya hubungan nasab di antara keduanya. Kondisi serupa akan didapati anak li'an karena anak li'an memiliki posisi yang sejajar dengan anak luar kawin.

Perwalian terhadap anak tidak hanya berlaku untuk perwalian atas dirinya sendiri. Perwalian anak berikutnya adalah perwalian atas harta benda anak itu. Perwalian terhadap harta benda anak ini diperlukan oleh seorang anak yang masih belum dewasa dan belum paham untuk mengelola, mengatur, dan melindungi harta benda yang dimilikinya. KHI Pasal 110 sampai Pasal 112 membahas tentang kewajiban, tanggung jawab, dan larangan bagi seorang wali anak, baik atas diri pribadi anak maupun atas harta benda anak itu. Ketentuan-ketentuan dalam KHI itu dengan jelas menjabarkan bahwa seorang wali wajib mengurus diri dan harta

anak yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang wali juga tidak boleh mengikat dan membebani harta anak yang menjadi walinya, kecuali demi kepentingan yang menguntungkan bagi anak itu. Jika suatu saat terjadi kerugian akibat kelalaian wali dalam mengelola harta anak, wali itu wajib mengganti atas kerugian yang terjadi. Bila telah tiba masa akhir perwalian karena anak itu telah berusia 21 tahun atau telah menikah, seluruh harta benda anak yang dikelola dan disimpan oleh wali harus diserahkan sepenuhnya kepada anak itu. Dengan tercapainya batas usia anak yang mendapat hak perwalian, berakhir pula tugas perwalian yang diemban oleh wali tersebut.

Hak perwalian adalah hak yang dapat diterima oleh seorang anak atas diri pribadinya dan harta benda miliknya. Perwalian atas diri pribadinya dapat berupa pemeliharaan, perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, serta menjadi wali nikah untuk anak perempuan. Perwalian atas harta benda anak itu berupa pengelolaan, pengaturannya, dan penyimpanan harta benda anak oleh walinya yang nantinya akan diserahkan kepada sang anak apabila anak itu telah berakhir masa perwaliannya. Seorang anak sah berjenis kelamin perempuan dapat mendapat hak wali nikah dari bapak atau laki-laki di keluarga bapak yang memiliki hubungan nasab dengan anak itu. Namun, anak luar kawin dan anak li'an yang berjenis kelamin perempuan tidak berhak atas itu karena tidak bernasab dengan bapak dan keluarga bapaknya sehingga wali nikahnya adalah wali hakim.



saling mengontrol kewenangan satu sama lain (*checks and balances*).<sup>3</sup> Selain terjadi pergantian sistem kelembagaan, terjadi pula pembentukan lembaga baru yang ditempatkan pada sektor kehakiman atau *judicial*. Lembaga baru yang terbentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

MK muncul sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan kedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yang bekerja secara merdeka dan mandiri. Kedudukan MK tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Muatan dalam UU No. 24 Tahun 2003 itu juga tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kekuasaan yang merdeka menandakan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat mengintervensi hasil dan keputusan yang diberikan oleh MK. Hal ini dikarenakan setiap lembaga negara di Republik Indonesia berada pada tingkat dan kedudukan yang sama. Oleh karena berada pada tingkatan yang sama, kedudukan MK sebagai lembaga kehakiman memiliki hubungan dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Untuk itu, uraian di bawah ini menjelaskan kedudukan MK

---

<sup>3</sup> Mirja Fauzul Hamdi, “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonstruksi Hukum Acara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3 (September, 2019), 317.



bawahnya. Namun, hanya bersifat hierarkis. Berbeda halnya dengan hubungan antara MA dan MK, yakni hubungan yang bersifat horizontal-fungsional. Hubungan horizontal-fungsional antara MA dan MK memiliki arti bahwa dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, masing-masing mempunyai kompetensinya masing-masing dan bekerja tanpa saling menyubordinasi satu sama lain.<sup>5</sup>

Menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan kompetensinya didasarkan pada fungsi dari MA dan MK. MA memiliki kompetensi dalam melakukan penegakan hukum dan keadilan yang membawahi lingkungan peradilan di bawahnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2). Artinya, MA menerapkan sistem kekuasaan kehakiman yang bercabang dari wilayah peradilan di bawahnya. Penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan MA itu diterapkan dengan cara mengawasi adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Kompetensi yang berbeda dijalankan oleh MK, yakni menjalankan sistem peradilan hanya dalam lingkungan permasalahan ketatanegaraan berdasarkan ketentuan UUD 1945.<sup>6</sup> Sistem peradilan MK pun berbeda dengan MA, yakni bersifat mandiri dan tidak bercabang, sehingga hanya ada di pusat saja. Namun, hal-hal yang berkaitan dalam mengadili undang-undang diperlukan koordinasi antara MA dan MK agar tidak terjadi tumpang tindih saat undang-undang tengah

---

<sup>5</sup> Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi Prosedur Berperkara pada Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 5.

<sup>6</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013). 77-78.

dibahas di salah satu kekuasaan kehakiman tersebut. Dengan demikian, MK berkedudukan setara dengan MA yang dalam menjalankan tugas dan wewenang tetap sesuai koridor kompetensinya dan tidak saling menyubordinasi dengan tugas dan wewenang yang MA lakukan.

#### **b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) dalam Kekuasaan Kehakiman**

Pascaamandemen UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara. Kedudukan MPR yang hanya sebagai lembaga negara menjadikannya sejajar atau setara dengan MK. Kedudukannya yang setara dengan MK menjadikan MPR dan MK memiliki hubungan. Hubungan itu diwujudkan dalam bentuk kewenangan keduanya untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden seperti yang tertuang dalam Pasal 7A dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945. Pasal 7A UUD 1945 berbunyi sebagai berikut.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 24 C ayat (2) berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Berdasarkan dua pasal dalam UUD 1945 itu dapat diketahui bahwa MPR selaku lembaga yang berwenang atas pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden akan mendapat usul dari DPR terkait usul pemberhentian itu. Sebelum





Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Kekuasaan eksekutif yang dimiliki presiden pada saat sebelum amandemen UUD 1945 mengakibatkan tidak terbatasnya kekuasaan tersebut yang berdampak pada adanya subordinasi kelembagaan lainnya, termasuk kekuasaan kehakiman. Namun, pascaamandemen hal tersebut dapat dihindari dengan adanya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kekuasaan yang dapat mengintervensi keputusan yang dibuat oleh kekuasaan kehakiman, seperti MK, termasuk presiden selaku kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, posisi MK selaku lembaga kekuasaan kehakiman dengan presiden selaku kekuasaan eksekutif sejajar dan berjalan sesuai dengan kompetensi masing-masing yang sesuai dengan UUD 1945 dan tidak saling menyubordinasi.

Meskipun presiden dan MK berjalan sesuai kompetensi masing-masing, keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan antara presiden dan MK ditunjukkan dengan adanya keterlibatan presiden dalam pengajuan tiga orang hakim konstitusi dari total sembilan hakim konstitusi dan penetapan kesembilan hakim konstitusi tersebut.<sup>8</sup> Adanya tiga orang hakim konstitusi yang diajukan oleh presiden dalam susunan hakim MK tidak mempengaruhi tugas dan wewenang yang diemban MK jika berhubungan dengan presiden. Artinya, keputusan yang dibuat oleh para hakim MK tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, walaupun putusan itu berhubungan dengan presiden. Hal ini ditunjukkan dari wewenang

---

<sup>8</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 14.

MK untuk melakukan *judicial review* atas undang-undang yang telah disusun presiden bersama DPR. MK dapat menilai dan memutuskan pembatalan undang-undang yang sudah disahkan presiden itu jika benar-benar ditemukan hal yang bertentangan dari undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Pembatalan undang-undang yang dilakukan MK itu dapat berupa sebagian atau keseluruhan pasal dalam undang-undang tersebut pascapengujian materi (*judicial review*) atas undang-undang itu.<sup>9</sup>

Tidak hanya yang telah dijelaskan sebelumnya, kedudukan MK yang setara dan tidak saling mengintervensi dengan lembaga lain, khususnya presiden, ditunjukkan dengan penerapan keobjektivitasan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden atas dugaan pelanggaran yang tercantum dalam UUD untuk selanjutnya diteruskan kepada MPR. Tugas memeriksa, mengadili, dan memutus hasil sengketa pemilu, termasuk calon presiden dan wakil presiden, juga diemban oleh MK. Jika antarlembaga dapat saling mengintervensi, sudah barang tentu terjadi adanya intervensi presiden selaku lembaga eksekutif negara dalam keputusan MK untuk tidak memberhentikannya atau untuk memenangkan sengketa pemilu. Namun, hal itu tidak terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan yang menimbulkan adanya *checks and balances* antarlembaga negara sehingga semua lembaga negara berada pada posisi yang setara dan dapat saling mengontrol. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa baik MK maupun presiden tidak ada yang saling menyubordinasi karena keduanya berjalan sejajar.

---

<sup>9</sup> Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2007), 127.



1945. Dengan demikian, kedudukan dan hubungan antara MK dan DPR adalah bekerja sesuai kompetensi tanpa melanggar UUD 1945 dan tidak saling mengintervensi satu sama lain.

#### **e. Kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap Lembaga Negara Lainnya dalam Kekuasaan Kehakiman**

Lembaga negara lainnya yang tercantum dalam UUD 1945, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial (KY) memiliki kedudukan yang sejajar dengan MK. Pascaamandemen UUD 1945 yang mengubah pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan menjadikan lembaga-lembaga negara tersebut menjadi sejajar. Pernyataan ini menjadikan tidak ada satu pun lembaga yang saling menyubordinasi atau saling mengintervensi karena semuanya telah diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya posisi yang sejajar itu juga menyebabkan antarlembaga dapat saling melakukan kontrol (*checks and balances*) sehingga semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan UUD 1945.

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Pascaamandemen UUD 1945, MK berdiri menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang kewenangnya diatur dalam UUD 1945. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”



3) Diperlukan adanya prosedur dan teknis memutuskan beragam persengketaan yang tidak dapat diputuskan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran partai politik.

Hal-hal yang disebutkan itu memiliki kaitan yang erat dengan kewenangan yang dilakukan oleh MK sebagai lembaga negara kekuasaan kehakiman di bidang konstitusional. Itulah sebabnya, keberadaan MK sangat diperlukan dan kewenangan MK sangat menunjang terwujudnya demokrasi konstitusional di Indonesia.

Tercantumnya kewenangan dan kewajiban MK selaku lembaga kekuasaan kehakiman di bidang konstitusional dalam UUD 1945 pascaamandemen menunjukkan semakin kuatnya prinsip negara hukum di Indonesia. Negara Indonesia yang menganut asas demokrasi menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang dipegang dalam sistem ketatanegaraannya. MK sebagai lembaga kehakiman memiliki dua fungsi terkait keberadaan kontitusi negara tersebut, yakni sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.<sup>13</sup> Selanjutnya, dua fungsi tersebut akan dipegang teguh oleh MK dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman selain MA. Berikut ini penjelasan secara rinci tentang setiap wewenang dan kewajiban yang dimiliki MK sesuai dengan UUD 1945.

---

<sup>13</sup> Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2 (Agustus, 2011), 670.





- a) Aspek yuridis; didasarkan pada teori *Stufen* bahwa peraturan dengan kedudukan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan peraturan dengan kedudukan lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferiori*). Oleh karena itu, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.
- b) Aspek politis; didasarkan pada adanya keperluan untuk melakukan *judicial review* agar materi muatan yang terkandung dalam undang-undang tidak bertentangan dengan UUD. Pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD sehingga muatannya tidak boleh bertentangan.
- c) Aspek pragmatis; didasarkan pada adanya kebutuhan terhadap *judicial review* sebagai langkah pencegahan terjadinya penyimpangan UUD dalam pelaksanaan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tanpa *judicial review* akan banyak terjadi penyimpangan yang bertentangan UUD 1945.

Pengujian undang-undang dilakukan oleh MK yang telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam UU MK itu, pasal yang membahas tentang kewenangan MK ini tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan sembilan orang hakim konstitusi, kecuali dengan keadaan yang luar biasa dengan tujuh orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK dibagi













oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebabkan seseorang seharusnya menjadi anggota DPD, pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden berlanjut ke putaran berikutnya atau menjadi presiden dan/atau wakil presiden terpilih, dan jumlah kursi partai politik. Atas hal tersebut, Pasal 74 ayat (1) UU MK membahas tentang pemohon yang berhak mengajukan permohonan tentang hasil pemilu antara lain perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya pada Pasal 75 disebutkan bahwa dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara tersebut, serta menyajikan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon.

Dalam perkara peradilan, ada pemohon dan ada termohon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai termohon dalam kasus perselisihan hasil pemilu. Posisi KPU pusat di Jakarta sebagai termohon dikarenakan MK hanya memutus kasus yang sifatnya nasional. Meskipun pemilihan suara dilakukan di daerah pemilihan, KPU pusat mengambil peran dalam penetapan hasil pemilu tersebut. Hal inilah yang menyebabkan KPU sebagai pihak termohon.

Permohonan yang masuk ke BRPK selanjutnya akan dipertimbangkan dan disidangkan oleh sembilan hakim konstitusi MK. Kesembilan hakim konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu dalam waktu terbatas. Putusan









Dalam menjalankan tugasnya sebagai kekuasaan kehakiman, MK memiliki kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Berdasarkan kedua ayat tersebut, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Di antara semua kewenangan MK tersebut, pengujian undang-undang terhadap UUD atau yang biasa disebut *judicial review* menjadi wewenang MK yang mendominasi.

*Judicial review* dapat didefinisikan sebagai suatu pranata dalam ilmu hukum yang memberikan wewenang kepada badan atau lembaga peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman guna meninjau ulang ketentuan dan semangat konstitusi dengan cara menerapkan atau menafsirkan hal tersebut, sehingga hasil dari peninjauan ulang tersebut dapat memberi solusi yuridis atas muatan yang ditinjau.<sup>35</sup> Pada proses peninjauan ulang ini sangat mungkin terjadi penambahan atau pengurangan terhadap suatu isi ketentuan yang menjadi rujukan aparat pemerintah atau pihak lain untuk mengambil tindakan atau tidak.<sup>36</sup> Dalam UUD 1945 disebutkan juga terkait pengertian *judicial review* atau pengujian undang-undang, yakni pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK

---

<sup>35</sup> Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 (November, 2012), 1.

<sup>36</sup> Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang", *Jurnal Yuridika*. Vol. 31, No. 3 (September, 2016), 392-393.



Perkawinan, khususnya tentang materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) terhadap Pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas tentang status perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) membahas tentang status anak. Kedua pasal tersebut dirasa merugikan karena pemohon Machica Mochtar tidak mendapat hak konstitusionalnya yang tercantum dalam UUD yang disebutkan sebelumnya karena latar belakang perkawinannya dengan laki-laki yang secara agama sah menjadi suami sekaligus ayah biologis dari putranya.

Machica Mochtar selaku pemohon telah melakukan perkawinan dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta dan sah menurut syariat agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Perkawinan ini sah secara agama karena keduanya telah mengikuti prosedur perkawinan sesuai dengan agama yang mereka anut, yakni agama Islam.<sup>39</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, perkawinan tersebut tidak legal secara hukum negara karena tidak adanya pencatatan sipil di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah setempat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>38</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 69.

<sup>39</sup> Fuad Thohari dkk., “Otoritas Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VI/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah di Pengadilan Agama Studi Pandangan Hakim Agama Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten” (Laporan Penelitian Berbasis Publikasi Nasional Terakreditasi - UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2014), 66.



























perkawinan kaitannya dengan status perkawinan dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tentang status anak yang lahir di luar perkawinan tercatat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta dan hukum, MK menyampaikan bahwa MK berwenang untuk mengadili permohonan a quo yang diajukan oleh pemohon, pemohon yang mengajukan permohonan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga berhak mengajukan permohonan, dan pokok permohonan beralasan menurut hukum diterima untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya.<sup>62</sup>

Pokok permohonan yang dikabulkan oleh MK adalah pokok permohonan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sedangkan yang tidak dikabulkan permohonannya adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perihal ditolaknya pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dalam persidangan, MK berpendapat bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dapat diketahui bahwa perkawinan menjadi sah bukan karena adanya pencatatan perkawinan, tetapi karena telah dilaksanakan sesuai ketentuan menurut agama masing-masing. Namun, dicatatkannya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama wajib dilakukan secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup> Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan

---

<sup>62</sup> Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 42.

<sup>63</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 186.







perkawinan dapat dihubungkan hak keperdataannya dengan bapak biologisnya dan keluarga bapak biologisnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti sah lainnya bahwa laki-laki itu adalah bapak biologisnya.

Amar putusan MK yang berikutnya adalah menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya dan memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Maksudnya, permohonan pemohon selain Pasal 43 ayat (1) itu ditolak karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, ketentuan itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya, hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak sepenuhnya menjadi jalan keluar atas kasus anak luar kawin. Hal ini dikarenakan Putusan MK itu tidak secara jelas dan gamblang mendefinisikan anak luar kawin seperti apa yang masuk dalam kriteria yang dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu dan teknologi sebagai bapak biologis anak itu. Dalam kasus yang melatarbelakangi adanya Putusan MK itu, anak luar kawin berasal dari anak yang perkawinan orang tuanya sah secara agama, tetapi secara formal tidak dicatatkan (hukum negara), atau bisa dikatakan anak itu adalah anak luar kawin akibat perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan. Apakah hanya sebatas anak luar kawin akibat tidak ada pencatatan perkawinan atau anak luar kawin akibat sebab lain, seperti anak luar kawin yang orang tuanya



terbukti sebagai bapak biologisnya. Dalam KHI, hubungan yang timbul akibat adanya pertalian darah disebut dengan hubungan nasab yang mempengaruhi hak-hak anak, seperti hak pemeliharaan, penghidupan (penafkahan), kewarisan, dan perwalian. Muatan dalam KHI sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan menyebut hubungan pertalian darah sebagai hubungan perdata.

Putusan MK terkait anak luar kawin tidak secara jelas menjabarkan hubungan perdata seperti apa yang tercipta akibat adanya pembuktian hubungan darah anak luar kawin dengan bapak biologisnya; apakah hanya sekadar hubungan perdata dalam hal pemeliharaan dan pemberian nafkah seperti yang disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan MK, terkait tanggung jawab laki-laki yang telah menyebabkan kelahiran anak tersebut; apakah hubungan keperdataan hingga timbul hak saling waris-mewaris dan perwalian antara anak tersebut dengan bapak biologisnya. Putusan MK itu pada akhirnya hanya menyebutkan adanya hubungan keperdataan tanpa memberi penjelasan lebih lanjut bentuk hubungan keperdataan yang timbul.

Menurut Mahfud MD, hubungan perdata untuk kasus anak luar kawin seperti ini berbeda dengan hubungan nasab. Hubungan keperdataan yang timbul itu berkaitan dengan kewajiban dari pihak laki-laki yang terbukti sebagai bapak biologis anak luar kawin untuk memberi nafkah dan melakukan pemeliharaan dan penghidupan yang layak terhadap anak tersebut dan tidak serta merta terhubung nasabnya dengan anak itu. Hal ini dikarenakan anak itu lahir di luar perkawinan sehingga tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapak biologisnya. Hubungan



nasab yang tidak bisa dihubungkan itu berkaitan dengan hak waris dan hak perwalian anak.<sup>73</sup>

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya berkaitan dengan hubungan antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya, baik ibu kandung maupun bapak biologisnya. Putusan MK itu tidak menyinggung persoalan perzinaan karena perzinaan masuk ranah pidana, sedangkan yang diuji di MK adalah persoalan perdata dalam Undang-Undang Perkawinan. Tujuan diputuskannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah untuk melindungi hak-hak anak yang terlahir ke dunia, walaupun anak itu berasal dari perbuatan orang tuanya yang tidak sesuai norma yang berlaku. Tidak adil kesalahan yang dilakukan orang tua anak luar kawin dijatuhkan pula kepada anak luar kawin tersebut. Di samping itu, Putusan MK ditujukan untuk keadilan perempuan, ibu, karena dalam Undang-Undang Perkawinan itu yang harus menanggung akibat perbuatan dua orang hanya pihak perempuannya saja, yakni ibu dari anak luar kawin. Pihak lakinya lepas dari tanggung jawab karena tidak ada hukum yang mengikat atas keperdataannya dengan anak tersebut. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkedudukan sebagai anak luar kawin dan memberikan keadilan kepada ibu anak tersebut.

Persoalan yang juga muncul dari Putusan MK adalah dibuatnya norma baru oleh MK dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang melampaui kewenangan. Sebenarnya kewenangan MK hanya sebatas menetapkan

---

<sup>73</sup> <https://www.dakwatuna.com/2012/03/20/19472/mahfud-md-vonis-mk-dan-fatwa-mui-sudah-sejalan/#axzz6QaLdp6vs>, diakses tanggal 27 Januari 2019.

keberlakuan norma dalam undang-undang atau membatalkan norma, yang dikenal dengan *negative legislature*. MK tidak diperkenankan untuk mengintervensi kewenangan yang ada pada lembaga legislatif. Lembaga legislatif mempunyai kewenangan membuat undang-undang, yang disebut *positive legislature*. Moh. Mahfud MD., mantan Ketua MK, menegaskan kewenangan MK yang tidak boleh dilampaui, khususnya pengujian konstiusionalitas undang-undang. Putusan yang bersifat mengatur bukan menjadi ranah MK. Rambu-rambu ini tidak boleh ditabrak. Namun, para hakim konstitusi terkadang dihadapkan pada realitas di lapangan yang harus membuat putusan untuk melakukan terobosan hukum baru dengan mengesampingkan rambu-rambu kewenangan MK. Jika tidak berani melakukan putusan dengan terobosan hukum baru, MK tidak dapat memberikan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.<sup>74</sup>

Di antara putusan MK yang bersifat mengatur adalah putusan konstiusional bersyarat. Dalam putusan konstiusional bersyarat dinyatakan bahwa Undang-undang tidak bertentangan dengan UUD dengan mensyaratkan pemaknaan yang harus dilakukan lembaga negara dalam menerapkan undang-undang yang mengacu pada penafsiran MK tersebut. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 termasuk dalam kategori putusan konstiusional bersyarat karena dalam pertimbangan putusan itu disebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pasal itu bertentangan dengan UUD

---

<sup>74</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), xv.

(inkonstitusional) jika tidak dimaknai seperti yang dimaknai oleh MK dalam putusan itu.

Kalau dilihat dari kewenangan MK, putusan itu telah melampaui kewenangan MK karena kewenangan MK sebenarnya hanya *negative legislature*, yakni hanya memutuskan untuk membatalkan norma atau mempertahankan norma tetap berlaku, bukan membuat atau mengatur norma baru. Nampaknya, MK berani melakukan pergeseran dari *negative legislature* ke *positive legislature* ditujukan untuk menegakkan keadilan substantif. MK tidak berpijak pada keadilan prosedural yang hanya bersemangat pada legalitas formal undang-undang, tetapi berupaya untuk merealisasikan substansi hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum ada tiga prinsip yang harus ditegakkan secara bersama-sama dalam setiap putusan, yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Memang dalam pelaksanaannya sulit dilakukan secara bersamaan, karena cenderung berbenturan. Di sinilah MK dalam perkara tertentu lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum karena itulah tujuan hukum daripada mempertahankan kepastian hukum yang tidak bisa merealisasikan tujuan hukum itu sendiri.

Dalam Putusan MK tentang anak luar kawin, MK mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum. Anak luar kawin harus mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh keadilan hukum. Anak luar kawin dirugikan dengan ketentuan undang-undang yang mengaburkan status/kedudukan anak luar kawin dengan menghilangkan hubungan keperdataannya dengan bapak biologisnya. Ketidakjelasan status anak luar kawin mengakibatkan anak luar kawin tidak

mendapatkan perlakuan adil; mengalami stigma sosial; dan mendapat perlakuan diskriminatif. Terjadi ketidakadilan juga jika yang harus menanggung hanya pihak perempuan terhadap anak luar kawin, padahal anak luar kawin merupakan hasil perbuatan berdua, laki-laki dan perempuan, mengapa laki-laki lepas tangan dan bebas dari tanggung jawab, sedangkan perempuan harus mengalami nasib yang menyedihkan dengan menanggung beban sendirian. Dengan dasar perlindungan dan penegakan keadilan hukum, MK mengambil langkah yang melampaui wewenang dengan menggeser posisi *negative legislature* ke *positive legislature*, yakni memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan yang sudah berlaku agar tidak inkonstitusional.

Dengan terobosan yang dilakukan MK yang melampaui kewenangannya, MK berkontribusi dalam pembangunan hukum responsif dan egaliter. Putusan bukan hanya mengabdikan kepada kepastian hukum, tetapi jauh yang lebih penting adalah penegakan substansi hukum yang sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Tidak ada manfaatnya kepastian hukum tegak, tetapi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum tidak diterima dan dirasakan masyarakat. Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah kesetaraan hukum di masyarakat. Hal ini sering terjadi, tetapi terkadang tidak diperhatikan dan dianggap hal yang biasa karena sudah mentradisi, seperti kesetaraan gender. Perempuan seringkali menerima perlakuan diskriminatif, sedangkan laki-laki mendominasi dan merasa berhak pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan.

### **C. Respons Publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang kedudukan anak luar kawin menjadi sorotan publik. Putusan ini menimbulkan beragam respons dari berbagai kalangan, baik dari MUI, Kementerian Agama, ahli/pakar hukum, aktivis anak dan perempuan, bahkan dari kalangan akademisi. Respons yang muncul ke permukaan pascaterbitnya putusan ini ada yang berupa respons positif mendukung putusan dan adapula respons negatif yang mengkhawatirkan efek samping keluarnya putusan ini.

Sejak mulai diperkarakan dan berakhir dengan terbitnya putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin, publik sudah memberi perhatian terhadap kasus ini. Perhatian tersebut diwujudkan dengan respons positif (pro) maupun respons negatif (kontra) terhadap permohonan kasus status kedudukan anak luar kawin, bahkan hingga permohonan tersebut diputuskan. Beragam opini dan tanggapan terkait perubahan isi ayat dalam UU Perkawinan ini menuai kontroversi.

Respons pertama yang menjadi sorotan pada saat itu adalah respons yang diberikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat itu, K.H. Ma'ruf Amin, Ketua MUI mewakili MUI, selaku lembaga yang menghimpun para ulama, memberi respons tegas atas terbitnya putusan MK tersebut. Pasalnya, MUI mengkhawatirkan putusan tersebut justru merusak tatanan kehidupan umat Islam karena hukum perkawinan berdasar dari hukum Islam. Respons tegas yang





adanya putusan MK tentang kedudukan anak luar kawin memberi perlindungan hukum bagi anak-anak yang bernasib demikian sehingga bisa mendapatkan haknya untuk diakui oleh ayah biologisnya.

Respons tidak setuju dari kalangan ahli hukum atas penetapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin ini dilontarkan oleh Munasik, selaku hakim yang pernah memutus kasus kedudukan anak luar kawin di Pengadilan Agama Kota Malang. Putusan MK tersebut menyebutkan “*anak di luar kawin*”. Anak di luar kawin menurut Munasik adalah anak zina. Hal ini diungkapkannya atas dasar bahwa tujuan adanya putusan MK tersebut untuk melindungi hak anak di luar kawin. Anak yang berasal dari hasil perkawinan sah secara agama, tetapi tidak tercatat negara atau perkawinan siri umumnya masih terlindungi hak-haknya. Berbeda halnya dengan anak luar kawin atau anak zina yang sering kesulitan mendapat perlindungan hukum. Ditambahkannya lagi, keperdataan yang tercantum dalam putusan MK tersebut sebaiknya merujuk pula pada undang-undang perlindungan anak, yakni berhak mendapat kehidupan yang layak, tetapi tidak sampai pada hak nasab anak tersebut.<sup>80</sup>

Para akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tergabung dalam penelitian tentang implementasi putusan MK di PA Semarang memiliki pandangan bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya mengedepankan perlindungan hak dan kesejahteraan anak, serta memberikan persamaan derajat antara semua anak, baik anak sah maupun anak di luar perkawinan dengan tidak memperhatikan hukum yang berlaku di masyarakat saat

---

<sup>80</sup> Helmy Ziaul Fuad, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum Studi Kasus No: 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg” (Tesis -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2016), 66.









sosialnya dapat menjatuhkan mental anak tersebut sehingga dapat merusak kejiwaannya. Adanya Putusan MK ini menjadi jalan bagi para anak berstatus anak luar kawin untuk mendapat hak-haknya.<sup>87</sup>

Meskipun respons publik ada yang pro dan ada yang kontra, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini bersifat final dan mengikat yang artinya harus dipatuhi, dirujuk, dan diaplikasikan dalam setiap pertimbangan hukum yang akan diputuskan dalam lingkup lembaga peradilan, khususnya lingkungan pengadilan agama. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini nyatanya juga dapat memberi perlindungan kepada anak-anak luar kawin untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara dan sebagai anak biologis bapaknya selama merujuk dari hukum-hukum dan nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat. Dampak positif dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini juga dirasakan oleh pihak perempuan yang menjadi ibu kandung dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu. Beban dan tanggung jawab yang awalnya ditanggung sendiri oleh ibu kandung anak luar kawin menjadi dipikul bersama laki-laki yang terbukti bapak biologis anak itu karena hubungan keperdataan dengan bapak biologis itu timbul pascadiputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>87</sup> Rokhmadi, "Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010," *Sawwa*, Vol. 11, No. 1 (Oktober, 2015), 19.



bertugas dalam menurunkan sifat-sifat keturunan adalah kromosom.<sup>1</sup> Kromosom berupa struktur benang yang terdapat di dalam inti sel yang mempunyai tanggung jawab dalam sifat keturunan atau yang dikenal dengan hereditas. Kromosom mengandung materi genetik yang dikenal dengan *deoxyribonucleic acid* (DNA), yakni asam *deoksiribonukleat*. Kandungan yang terdapat dalam DNA adalah gen-gen yang berupa unit-unit hereditas yang diturunkan dari suatu turunan atau angkatan ke turunan berikutnya.<sup>2</sup>

DNA yang dijadikan acuan pada masa sekarang ini adalah model DNA yang ditemukan oleh James D. Watson dan Francis Crick. Penelitian mereka dilakukan tahun 1953. DNA terdiri atas susunan empat jenis molekul asam nukleotida dalam rangkaian polimer tidak bercabang. Nukleotida meliputi fosfat anorganik, gugus deoksiribosa, dan salah satu basa purin atau basa pirimidin. Basa purin berupa adenin (A) atau guanin (G), sedangkan basa pirimidin berbentuk timin (T) atau sitosin (C). Semua unsur yang tersusun dalam rangkaian DNA dikenal dengan sebutan gen. Gen berada di dua tempat, yaitu dalam inti sel (nDNA) dan dalam organel mitokondria (mtDNA). Lokasi ini mengode informasi

---

<sup>1</sup> Pada tahun 1842 Karl Wilhelm von Nageli meneliti kromosom. Penelitian ini merupakan penelitian pertama kali tentang kromosom. Selanjutnya, ciri-ciri kromosom diteliti secara detail oleh Walther Flemming pada tahun 1882. Sebelumnya, pada tahun 1865, seorang ilmuwan genetika, Gregor Mendel, menghasilkan pemikiran deduksi yang berwujud prinsip-prinsip klasik genetika. Setelah itu, dua ilmuwan genetika, Theodor Boveri dan Walter Sutton, melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah simpulan bahwa ada kesamaan antara hukum Mendel dengan perilaku kromosom saat meiosis (cara sel melakukan pembelahan). Keduanya menegaskan bahwa kromosomlah yang membawa gen. Hasil penelitian dari kedua ilmuwan ini dikenal dengan teori hereditas kromosom. Namun, teori ini diperdebatkan pada saat itu dan menjadi temuan kontroversial. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Thomas Hunt menguatkannya bahwa memang pembawa gen adalah kromosom. Lihat Sinta Sasika Novel dkk., *Genetika Laboratorium* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 53-54.

<sup>2</sup> Heru Santoso Wahito Nugroho, *Memahami Genetika dengan Mudah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), 4.



Hal itu berarti bahwa laki-laki tersebut telah dibuktikan dengan meyakinkan bukan ayah kandung dari anak itu. Seseorang bisa dieksklusi jika ditemukan alel (gen yang terdapat di dalam anggota badan dan menyebabkan sifat yang sama) tidak sesuai pada dua lokus STRs (*short tandem repeats*) yang berbeda. STRs berupa rangkaian 2-6 bp (*base pair*, pasangan basa) yang beberapa kali berulang.

Inklusi diartikan bahwa seseorang tidak dapat disingkirkan probabilitasnya sebagai orang yang dicari. Hal itu terjadi kalau kesesuaian terdapat pada semua lokus yang dites. Namun, tidak hanya sebatas itu dapat disimpulkan, tetapi harus dihitung secara statistik karena harus mengkalkulasi probabilitas adanya orang yang mempunyai alel-alel yang kebetulan sama. Penghitungan digunakan untuk mengevaluasi data frekuensi alel dari populasi orang tersebut berasal.

Pemeriksaan STRs dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan bahan tes; tahap berikutnya mengambil sampel; kemudian menuju tahap isolasi DNA; setelah itu, proses elektroforesis dan PCR (*polymerase chain reaction*); diteruskan analisis data; dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel rambut atau cairan tubuh. Sampel tersebut diekstraksi, yakni membran sel dipecah dengan memberikan enzim ke dalam sebuah larutan yang terdapat sampel DNA. Setelah itu, dipisahkan DNA melalui elektroforesis dengan menggunakan medan listrik untuk menyusun molekul. PCR digunakan untuk proses penyalinan DNA. Data laboratorium ini dianalisis untuk menemukan penanda genetika dan















terjadinya persetubuhan di luar perkawinan karena sudah menjadi sunnatullah tidak mungkin adanya kehamilan tanpa persetubuhan; kecuali hanya satu peristiwa yang terjadi di dunia suatu kehamilan tanpa persetubuhan, atas izin Allah, yakni kehamilan Maryam atas Nabi Isa as. yang dikandungnya.

Dari praktik penerapan alat bukti *qarīnah* dalam beberapa kasus di atas dapat dinyatakan bahwa *qarīnah* diakui sebagai alat bukti sepanjang memenuhi standar yang meyakinkan. Standarnya adalah (1) *qarīnah* harus konkret, yakni hal yang bersifat empirik atau sesuatu yang riil yang dapat diindra dan (2) relevan dengan persoalan yang terkait, yakni mempunyai hubungan yang sesuai antara hal yang konkret dengan hal yang tersembunyi.

Dengan berdasarkan definisi dan kriteria *qarīnah* di atas, tes DNA merupakan alat bukti *qarīnah*. Tes DNA di masa lalu memang belum muncul sehingga tidak ada kasus yang dibuktikan dengan hasil tes DNA, baik dalam persoalan kriminal maupun perdata, khususnya persoalan penelusuran asal usul anak. Tes DNA yang sama dengan *qarīnah* (yang sudah berlaku sejak dahulu) melacak dan menemukan indikasi-indikasi yang ada dan yang relevan dengan persoalan yang sedang diselesaikan. Namun, ada beberapa yang perlu ditegaskan bahwa *qarīnah* lebih umum karena dalam *qarīnah*, indikasi-indikasi diperoleh dari berbagai hal apa saja yang memiliki pertautan erat dengan suatu persoalan; selanjutnya, berbagai indikasi itu disimpulkan dengan suatu kesimpulan yang penuh keyakinan. Tes DNA bersifat khusus karena menelusuri indikasi-indikasi dari hal tertentu, yakni sel-sel tubuh manusia. Dengan bersifat khusus ini, tes

DNA memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan keotentikan yang kuat. Dengan demikian, tes DNA lebih kuat daripada *qarīnah* pada umumnya.

Taufiqul Hulam menganalogikan tes DNA dengan *qarīnah* karena adanya kesamaan *illah* hukum antarkeduanya. Keduanya sama-sama menangkap indikasi-indikasi; inilah yang menjadi *illah* hukumnya<sup>17</sup> Dengan demikian, tes DNA juga dapat dijadikan alat bukti sebagaimana halnya *qarīnah*. Namun, jika dicermati, analogi ini kurang tepat karena tes DNA sesungguhnya bagian dari *qarīnah*, bukan sesuatu yang lain di luar *qarīnah*. Hanya saja bentuknya berbeda dengan bentuk-bentuk *qarīnah* yang biasa digunakan. Jadi, tidak diperlukan analogi antara tes DNA dan *qarīnah*.

Dengan keakuratan dan validitas yang sangat tinggi, tes DNA termasuk kategori *qarīnah qaṭ'iyah* sehingga mencapai derajat yakin. Dengan derajat yakin, tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti final dan mandiri yang dapat digunakan untuk memutus suatu perkara, tanpa disertai alat bukti lainnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa tes DNA dijadikan bukti final dan tidak perlu disertai bukti lain untuk kasus yang berkaitan dengan keperdataan, seperti penentuan keturunan, karena tidak bisa disangkal akan keakuratan dan keyakinannya. Untuk kasus pidana, tes DNA tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti mandiri, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang harus disertai alat bukti lain karena kalau hanya tes DNA sebagai alat buktinya, dapat terjadi kesalahan karena pelaku kejahatan bisa merekayasa dan mengalihkan kepada orang lain.

---

<sup>17</sup> Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 120.









dan jumur ulama tidak mempersoalkan kepastian hasilnya karena tidak ada cara lain (bukti lain, seperti kesaksian) selain alat bantu *al-qiyāfah*, sedangkan Abū Ḥanīfah lebih memilih dasar *firāsh* yang secara hukum lebih kuat dan menganggap kekuatan *al-qiyāfah* masih dipertanyakan. Namun, pendapat Abū Ḥanīfah bermasalah ketika tidak ada *firāsh*, kemudian tidak mau menggunakan *al-qiyāfah*, tetapi menghubungkan kepada kedua orang yang mengklaim. Dengan demikian, tidak ada penyelesaian masalah, justru menimbulkan masalah baru. Anak tidak mendapatkan kepastian hukum akan nasab dan hak keperdataannya.

Dari definisi dan penerapan *al-qiyāfah* dalam melacak nasab anak, tes DNA sejalan dengan *al-qiyāfah* atau bisa dikategorikan sebagai *al-qiyāfah* dalam perkembangan modern. Tes DNA digunakan untuk menelusuri keturunan sebagaimana *al-qiyāfah*. Akurasi *al-qiyāfah* masa lalu tidak sampai pada derajat yakin (pasti), tetapi diakui sebagai penetapan asal usul anak yang absah (oleh mayoritas ulama). Apalagi dengan tes DNA, tingkat akurasi sangat tinggi dan dapat dipastikan hasilnya bahwa anak dan orang yang diduga orang tua biologisnya mempunyai hubungan keturunan atau tidak. Dengan demikian, tes DNA lebih akurat daripada *al-qiyāfah* sehingga dapat dijadikan dasar penetapan hubungan keturunan.

Tes DNA sebagai bagian dari perkembangan *al-qiyāfah* di zaman modern menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum yang responsif. Hukum responsif bisa ditegakkan melalui penyesuaian hukum terhadap perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi

itu menegaskan akan pengakuan eksistensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi dalam pembinaan hukum nasional. Salah satunya adalah tes DNA yang sangat menentukan nasib dan pemenuhan hak anak dalam memperkuat kekokohan bangunan masyarakat. Anak adalah cikal bakal dan generasi penerus bangsa yang menerima estafet kekhalifahan di muka bumi.

Dalam hal penetapan asal usul anak, sebenarnya Putusan MK ini justru menguatkan Pasal 103 KHI. Pasal 103 KHI menjelaskan mekanisme penetapan asal usul anak sebagai berikut.

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya; (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam pasal itu, pembuktian asal usul anak dapat melalui akta kelahiran maupun alat bukti lain. Ketika tidak bisa dibuktikan dengan dua hal itu, asal usul anak ditetapkan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang cermat atas bukti-bukti yang diajukan. Dengan Putusan MK, bukti-bukti yang sah dalam penetapan asal usul anak dapat berupa tes DNA yang merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, tes DNA diakui sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan asal usul anak.

## **B. Perubahan Ketentuan Nasab Anak Luar Kawin**

Dalam hukum Islam, nasab merupakan hal yang sangat mendasar dan penting karena persoalan nasab berimplikasi pada persoalan hukum lainnya, yakni

mempunyai akibat hukum terhadap persoalan keperdataan lainnya. Persoalan keperdataan tersebut meliputi persoalan pemeliharaan anak (alimentasi) yang mencakup nafkah dan pendidikan anak; persoalan kewarisan antara anak dan orang tuanya; dan persoalan perwalian. Persoalan nasab anak terkait erat dengan perkawinan dan persoalan perzinaan. Nasab anak dari hasil perkawinan yang sah tidak menjadi persoalan karena sudah jelas nasabnya kepada kedua orang tuanya, kecuali ada pengingkaran dari bapaknya. Dengan kejelasan nasab ini, antara anak dan ibu bapaknya memperoleh hak keperdataan. Nasab menjadi persoalan ketika anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah, yang biasa dikenal dengan anak luar kawin.

KHI menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Namun, persoalan kedudukan anak luar kawin muncul dengan Putusan MK yang mengubah ketentuan anak luar kawin bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya jika terbukti mempunyai hubungan darah dengan laki-laki itu. Putusan MK mempunyai konsekuensi hukum terhadap ketentuan anak luar kawin dalam KHI meskipun Putusan MK berkaitan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya persoalan anak luar kawin. Ketentuan anak luar kawin dalam KHI sama dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan itu. Di samping itu, KHI merupakan hukum materiil di Pengadilan Agama yang menjadi rujukan para hakim dalam memutus perkara.















Abī Waqqās. Meskipun ada kemiripan, ternyata Nabi saw. tidak memutuskan untuk memberikan dan menghubungkannya dengan orang yang mempunyai kemiripan rupa, tetapi memberikan kepada orang yang mempunyai status sebagai pemilik ranjang karena memang dialah yang berhak secara hukum dan demi kepastian hukum. Di samping itu, pemilik ranjang tidak mengingkari akan anak tersebut, bahkan mengklaim anak itu. Jika diberikan kepada orang yang mempunyai kemiripan akan menimbulkan masalah karena tidak meyakinkan. Kemiripan tidak bisa dijadikan patokan karena banyak orang yang mirip, tetapi tidak ada keterkaitan apa pun dengan orang yang mirip itu.

Putusan Nabi yang berkaitan dengan sengketa anak memberikan pembelajaran hukum bahwa penetapan hukum harus berdasarkan hal yang meyakinkan. Kemiripan rupa tidak bisa dipastikan karena pada saat terjadinya sengketa tersebut belum ada alat atau teknologi yang menunjukkan secara pasti bahwa dua orang yang mempunyai kemiripan memang terkait satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan kondisi sekarang, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang anak dapat ditelusuri siapa ayah kandung atau ayah biologisnya dengan menggunakan pemeriksaan DNA. Tes DNA dapat membuktikan ayah dari seorang anak walaupun ibu yang melahirkannya telah berhubungan seksual dengan dua orang laki-laki dalam waktu berdekatan, bahkan dalam waktu bersamaan.

Yang bisa dipastikan secara hukum saat perkara diajukan kepada Nabi saw. adalah status laki-laki yang menjadi pemilik ranjang. Putusan Nabi itu juga menunjukkan akan penegakan kehormatan keluarga (rumah tangga) yang harus









adalah institusi perkawinan.<sup>44</sup> Perkawinan menjadi media penyaluran nafsu seksual yang benar dan sarana meneruskan generasi manusia yang terhormat yang jelas asal usulnya. Penyaluran nafsu seksual yang ilegal di luar institusi yang sudah disediakan (perkawinan) merusak tatanan dan berdampak negatif pada pribadi seseorang. Oleh karena itu, perzinaan dilarang dan pelakunya dikenai sanksi.

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* klasik dalam hal pelestarian keturunan ini hanya ditujukan pada hikmah di balik pelarangan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindakan asusila. Perlindungan ini hanya bersifat parsial dan menyangkut pribadi-pribadi. Dengan pendekatan seperti ini, persoalan-persoalan hanya diselesaikan secara parsial dan hal-hal yang lebih universal dan menyeluruh dalam persoalan itu tidak dipertimbangkan.

Pemeliharaan keturunan yang dipahami sebagian ulama dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik tersebut menimbulkan persoalan ketika diterapkan dengan persoalan anak hasil perzinaan. Mereka berpegang teguh pada pemahamannya bahwa persoalan anak luar kawin bagian dari pemeliharaan keturunan. Mereka berargumentasi dengan teori *maqāṣid*-nya bahwa institusi perkawinan yang suci dan agung tidak bisa dicampuradukkan dengan perzinaan yang ilegal. Dengan institusi perkawinan, anak yang dihasilkan mempunyai kedudukan yang terhormat sebagai anak sah dan mendapatkan kehormatan dengan nasab kepada bapaknya. Sebaliknya, perzinaan sebagai tindakan keji dan jalan

---

<sup>44</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), 173-174.



dan kemanusiaan; dan (2) pergeseran kepada nilai-nilai dasar dan universal, dan (3) pergeseran deduksi dari kajian kitab fiqh kepada sumber orisinal (*naş*).<sup>46</sup>

Perlindungan keturunan dikembangkan menjadi perlindungan keluarga, bahkan sosial. Persoalan anak luar kawin perlu didudukkan secara proporsional dan dilihat dari berbagai aspek, baik aspek psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Anak terlahir ke dunia dalam keadaan suci dan tanpa noda, apa pun proses dan melalui apa kelahirannya, baik melalui perkawinan maupun perzinaan. Perzinaan yang dilakukan orang tuanya adalah satu hal dan anak akibat perzinaan adalah hal lain. Hal ini sering dicampuradukkan dengan alasan saling berkaitan, seperti hubungan sebab akibat. Perzinaan selamanya adalah perbuatan keji dan jelek sehingga pelakunya dikenakan sanksi untuk memberikan efek jera pada diri pelaku dan memberikan pembelajaran pada publik akan dampak negatif perbuatan asusila.

Anak yang lahir akibat zina dalam kehidupan sosial sering mengalami perlakuan negatif dan mendapatkan stigma sosial yang membuat anak dikucilkan dari kehidupan sosial. Dia sering mendapat label keji dengan julukan anak zina, anak haram, dan anak jadah. Dia menerima perlakuan diskriminatif akibat perbuatan orang tuanya. Dia dilahirkan bukan atas kehendaknya, tetapi harus menanggung beban dan dosa orang tuanya yang melakukan perbuatan yang tidak terhormat. Sebenarnya dosa seseorang tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Anak bebas dari dosa-dosa orang tuanya. Dalam hal ekonomi anak juga mengalami kendala karena hanya ibunya yang harus menanggung, sedangkan

---

<sup>46</sup> Lihat Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 4.

laki-laki yang menghamili ibunya bebas berkeliaran tanpa beban dan tanpa tanggung jawab.

Dengan berpegang pada nilai-nilai dasar universal, seperti kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, anak dari mana pun berasal berhak mendapat perlakuan yang baik sebagai anak manusia yang terhormat; memperoleh keadilan; dan memiliki kedudukan yang setara dengan yang lainnya. Dia berhak mempunyai ayah dan ibu meskipun dilahirkan akibat perzinaan. Dia juga berhak atas pemenuhan hak keperdataan sebagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan melalui perkawinan.

Menghubungkan nasab anak luar kawin kepada ayah biologisnya, setelah dibuktikan dengan tes DNA akan kepastian adanya hubungan darah (seperti nasab anak sah), tidak akan meruntuhkan bangunan institusi perkawinan. Ada orang yang sangat khawatir dengan pelegalan anak luar kawin; menasabkan anak luar kawin kepada bapak biologisnya dianggap sebagai tsunami hukum perkawinan Islam. Kekhawatiran ini tidak berdasar karena menghubungkan nasab kepada bapak biologisnya bukan berarti melegalkan perzinaan. Perzinaan sampai kapan pun tidak akan pernah dilegalkan karena bertentangan dengan nilai universal (kehormatan dan kemanusiaan) yang ada pada ajaran semua agama.

Jika anak luar kawin yang diakui nasabnya kepada bapak biologisnya akan meruntuhkan bangunan institusi perkawinan yang sakral, mengapa para ulama sepakat menghubungkan nasabnya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Mestinya anak luar kawin tidak dihubungkan kepada siapa pun karena hasil dari perbuatan ilegal. Ibn Ḥazm, sebagaimana kebanyakan ulama, menegaskan bahwa anak zina

secara otomatis dihubungkan kepada ibunya karena tidak diragukan lagi bahwa anak itu berada dalam rahim ibunya. Di samping itu, menurut Ibn Ḥazm, anak zina dihubungkan kepada ibunya karena Rasulullah menghubungkan anak kepada ibunya dalam hal li'an dan meniadakan hubungan nasab kepada bapaknya karena mengingkarinya.

Pernyataan Ibn Ḥazm mengandung problem (karena dia dan ulama lainnya tetap bertahan bahwa anak luar kawin hanya dihubungkan dengan ibunya dalam kondisi apa pun), bagaimana kalau bapak biologisnya dapat dipastikan mempunyai hubungan darah, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, yakni tes DNA yang akurasinya 99,99% sehingga dapat disejajarkan dengan kepastian anak dalam kandungan. Menganalogikan anak luar kawin (zina) dengan anak li'an untuk menghubungkan nasabnya kepada ibunya juga tidak tepat. Rasulullah menghubungkan nasab anak li'an kepada ibunya saja karena memang anak li'an berada dalam kandungan ibunya sehingga dipastikan sebagai ibunya, sedangkan Rasulullah tidak menghubungkan nasab anak kepada suami karena suami mengingkarinya dan tidak dapat dipastikan suami itu adalah bapak kandungnya. Anak luar kawin berbeda kondisi dan statusnya dibandingkan anak li'an.

Menghubungkan nasab anak luar kawin kepada ibunya saja dan keluarga ibunya menunjukkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dan perlakuan tidak adil. Pemikiran dan sikap ini dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, laki-laki ditempatkan dalam posisi yang lebih tinggi daripada perempuan; laki-laki mendominasi dalam berbagai peran dan memiliki

hak istimewa. Hal itu berpengaruh pada cara pandang dan pemahaman terhadap *naş*, khususnya berkaitan dengan persoalan anak dan perempuan.

Sejatinya Nabi telah melakukan revolusi hukum serta penegakan hak-hak anak dan perempuan yang sangat luar biasa pada masanya, peralihan dari Jahiliyyah ke Islam. Namun, dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosial, pembacaan dan pemahaman tekstual atas *naş* tidak memadai lagi untuk menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan kepentingan sosial. Pemahaman spirit *naş* dan pembacaan realitas dengan pendekatan *maqāşid al-sharī'ah* dihajatkan untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, tempat, kondisi, dan tradisi. Nilai-nilai universal digali sebagai dasar dan pijakan pendekatan *maqāşid al-sharī'ah*.

Pendapat sebagian kecil ulama yang menghubungkan nasab anak luar kawin dengan ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya dianggap sebagai pendapat yang ganjil karena berseberangan dengan mayoritas ulama. Hal ini menunjukkan adanya kuasa mayoritas. Kebenaran selalu ditempatkan di pangkuan mayoritas. Padahal, logika hukum yang dikemukakan sebagian kecil ulama sangat kuat seperti yang diakui oleh Ibn Qayyim. Anak luar kawin berasal dari sel telur perempuan dan sperma laki-laki; keduanya ikut andil dalam proses terjadinya anak. Ketika anak itu dapat dihubungkan nasabnya kepada perempuan (ibunya) padahal melalui persetubuhan di luar perkawinan, semestinya anak itu juga bisa dihubungkan nasabnya kepada bapak biologisnya. Pendapat ini sejalan dengan *maqāşid al-sharī'ah* kontemporer yang berpijak pada nilai-nilai universal dan

fundamental, yakni kesetaraan dan keadilan, dan tetap tidak mengabaikan teks (*naş*).

*Naş* (dalam hal ini adalah Hadis Nabi) mengakui nasab anak luar kawin, tetapi dalam penerapan nasab, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang melingkunginya; pada saat itu ada kesulitan mengidentifikasi secara cermat dan meyakinkan akan hubungan darah sehingga hanya dihubungkan kepada ibunya karena itulah yang pasti dan meyakinkan. Dengan tes DNA, dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa ada hubungan darah antara anak dan laki-laki yang diduga bapak biologis, maka anak dapat dihubungkan nasabnya juga kepada bapak biologisnya. Kesimpulan hukum ini tidak bisa dianggap sebagai penyimpangan dari syari'at Islam itu sendiri karena tetap sejalan dengan spirit *naş*.

MUI menanggapi Putusan MK dengan mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. Isi fatwa MUI ini menunjukkan posisi MUI dalam menetapkan kedudukan anak luar kawin (*zina*). MUI berpegang pada pendapat mayoritas ulama dengan menampilkan pendapat-pendapat mereka yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya saja sehingga menetapkan anak *zina* tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

MUI tidak mengemukakan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas dan menyebutkan kaidah *uşūliyyah* لا اجتهاد فى مورد النص. Sikap

MUI ini mengindikasikan bahwa MUI berpegang teguh pada pendapat mayoritas ulama dan menganggapnya sebagai suatu ketetapan final yang tidak bisa diotak-atik dengan menampilkan kaidah yang menyatakan tidak ada ijihad dalam hal yang sudah ada ketentuannya dalam *naş*. Meskipun demikian, MUI mencoba ikut andil dalam menyelesaikan persoalan anak luar kawin dengan menghimbau pemerintah menghukum laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan memberikan wasiat wajibah sepeninggalnya. Fatwa MUI itu tidak dapat memberikan solusi demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak luar kawin meskipun disertai himbauan tersebut. Sikap MUI ini menegaskan betapa kuatnya dominasi pemikiran fiqh klasik dan resistensi terhadap perkembangan dan perubahan. Dengan demikian, MUI tetap mempertahankan ketentuan anak luar kawin dalam KHI.

Dengan pendekatan *maqāşid al-sharī'ah* kontemporer, sebagaimana paparan di atas, ketentuan KHI tentang kedudukan anak luar kawin diubah sesuai dengan Putusan MK bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta juga dengan bapak biologis dan keluarga bapak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan darah.

Pendekatan *maqāşid al-sharī'ah* kontemporer terhadap persoalan anak luar kawin sejalan dengan teori *al-maşlahah al-Ṭūfī*. Dalam teori *al-maşlahah al-Ṭūfī*, *al-maşlahah* dijadikan sebagai dalil hanya berkaitan dengan kasus-kasus mu'amalah dan adat, sedangkan dalam persoalan ibadah dan *al-muqaddarah*





hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya dan tidak bisa dihubungkan nasab kepada bapak biologisnya.

Pendapat para ulama tentang nasab anak zina dianggap sebagai konsensus ulama. Meskipun dianggap konsensus ulama dalam persoalan nasab anak zina, ada persoalan dengan pendapat para ulama tersebut. Persoalan yang muncul adalah mengapa hanya dihubungkan nasabnya kepada ibunya dan tidak dihubungkan kepada bapak biologisnya juga, padahal keduanya sama-sama melakukan perzinaan. Jika alasannya adalah bahwa anak itu jelas berada dalam perut ibunya sehingga bisa dipastikan siapa ibunya, bagaimana jika dapat dipastikan juga bahwa bapak dari anak tersebut adalah orang yang menghamili ibunya melalui pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya tes DNA yang akurasinya sangat tinggi (99,99 %).

Persoalan berikutnya dari pendapat para ulama itu, adalah bahwa ada pihak yang dirugikan, yakni ibu dan anaknya. Ibunya harus menanggung beban sendirian, padahal perbuatan zina dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, mengapa yang harus menanggung adalah pihak perempuan. Anaknya juga menanggung beban hidup di masyarakat. Dia mendapatkan stigma sebagai anak zina, anak haram, atau sebutan negatif lainnya. Secara psikologis, anak tersebut mengalami tekanan mental dengan status yang tidak jelas, tanpa kejelasan siapa bapaknya. Dalam persoalan ekonomi, anak itu dirugikan karena kepentingan ekonomi untuk biaya hidup dan pendidikan tidak bisa didapatkan dari bapak (biologisnya). Dengan pertimbangan-pertimbangan itu yang merupakan bagian dari kemaslahatan, pemeliharaan *al-maṣlahah* lebih didahulukan daripada *naṣ* dan

ijma'. Namun, hal itu tidak berarti mengabaikan *naş* karena spirit *naş* tetap dipertahankan, yakni anak luar kawin (zina) mempunyai hubungan nasab yang berakibat hukum pada hak anak. Adapun nasabnya dihubungkan kepada siapa, hal ini berkaitan dengan persoalan pembuktian. Pada saat Hadis itu muncul, pembuktian yang meyakinkan tentang anak siapa hanya dengan keberadaan anak dalam rahim ibunya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui tes DNA, bapak biologis dari anak dapat ditentukan. Pembuktian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemaslahatan anak dan ibu merupakan bagian dari metode pengkhususan (*takhşīs*) dan penjelasan (*bayān*).

Teori *al-maşlahah al-Ṭūfi* sejalan dengan konsep *al-thawābit wa al-mutaghayyirāt*. Jika dihubungkan dengan teori *al-maşlahah al-Ṭūfi*, yang termasuk *al-thawābit* adalah persoalan ibadah dan persoalan-persoalan yang ditentukan hukumnya secara eksplisit dalam *naş*, sedangkan yang termasuk *al-mutaghayyirāt* adalah persoalan mu'amalah dan adat. Sebenarnya konsep *al-thawābit wa al-mutaghayyirāt* tidak terikat pada bidang-bidang itu. Dalam persoalan mu'amalah juga bisa mencakup *al-thawābit wa al-mutaghayyirāt*. *Al-thawābit* berkaitan dengan nilai-nilai fundamental dan universal, sedangkan *al-mutaghayyirāt* menyangkut persoalan-persoalan *juz'iyah* (parsial) dan teknis. Dalam persoalan anak luar kawin, hak nasab dan hak mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam hal keperdataan dikategorikan *al-thawābit*, sedangkan persoalan teknis pembuktian nasab anak termasuk dalam kategori *al-mutaghayyirāt*, mengikuti perubahan situasi dan kondisi; salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya tes DNA.

Dalam UU Perkawinan, KHI, bahkan Putusan MK, cakupan makna “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” juga menjadi persoalan. Hamam dalam disertasinya memaparkan bahwa anak luar kawin dalam Putusan MK hanya menjangkau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun anak yang dilahirkan akibat perzinaan tidak masuk dalam pengertian anak luar kawin. Dia hanya melihat Putusan MK dari latar belakang pemohon yang melakukan perkawinan, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Selanjutnya, Putusan MK itu dikaji Hamam dengan pendekatan *maṣlahah* al-Shātibī. Dia menyimpulkan bahwa Putusan MK sesuai dengan dengan *maṣlahah* al-Shātibī. Dengan demikian, putusan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari hasil temuannya, Hamam membantah Ma’ruf Amin dan Said Aqil Siradj yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hak keperdataan.<sup>49</sup>

Jika dilihat dari latar belakang Putusan MK, memang putusan itu dilatarbelakangi oleh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) oleh pemohon yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak pemohon dari hasil perkawinan itu. Namun, dalam isi Putusan MK tidak disebutkan secara jelas dan tegas yang dimaksudkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam Putusan MK hanya disebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan dan KHI. Dengan penyebutan itu tidak bisa hanya

---

<sup>49</sup> Hamam, “Anak Luar Nikah (Studi tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Perspektif *Maṣlahah al-Shātibī*)” (Disertasi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 190, 216-217.



dan seorang perempuan yang masih lajang, belum pernah melakukan perkawinan, tidak dikategorikan zina dalam hukum positif.

Anak luar kawin dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin selain anak zina dan sumbang. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau keduanya masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah yang dekat (*incest*) sehingga dilarang melakukan perkawinan oleh undang-undang. Anak luar kawin selain anak zina dan sumbang adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dengan menggunakan istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”. Kedudukan anak luar kawin di ayat (2) akan diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai sekarang peraturan pemerintah tentang anak luar kawin belum ada. Oleh karena itu, persoalan anak luar kawin masih mengacu hukum perdata bagi non-Muslim. Bagi orang Muslim, persoalan itu mengacu kepada hukum Islam.

Dengan paparan di atas, anak luar kawin dalam undang-undang perkawinan dan putusan MK tidak hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi mencakup anak yang dilahirkan akibat hubungan

---

<sup>52</sup> Lihat Harun Utuh, *Anak Luar Nikah Status Hukum dan Perlindungannya* (Rurabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 27-28; bandingkan M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 59.

seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan. Dengan demikian, kajian Hamam tentang anak luar kawin dalam putusan MK yang hanya membatasi anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan kurang tepat.

Bantahan Hamam terhadap K.H. Ma'ruf Amin dan K.H. Said Agil Siradj yang tidak mengakui hak keperdataan anak luar kawin tidak tepat dan tidak konsisten jika dilihat dari definisi yang dipegangi Hamam sendiri. Sesungguhnya K.H. Ma'ruf Amin dan K.H. Said Agil Siradj tidak berbeda dengan kajian Hamam yang menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* al-Shātibī. K.H. Ma'ruf Amin dan K.H. Said Aqil Siradj tidak mengakui hak keperdataan anak luar kawin jika dipahami anak luar kawin adalah anak hasil perzinaan, sedangkan kalau anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak ada masalah dan anaknya merupakan anak sah. Hal itu dapat dilihat dari Fatwa MUI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya, yang saat itu K.H. Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI Pusat.

Demikian juga dapat dipahami dari pernyataan K.H. Said Aqil Siradj seputar perwalian bagi anak di luar nikah.<sup>53</sup> Meskipun dalam pernyataannya, K.H. Said Aqil Siradj tidak menegaskan siapa yang dimaksud anak di luar perkawinan, pernyataannya itu dapat dipahami bahwa dia sama sekali tidak mengakui hak perwalian bapak biologisnya kepada anak itu. Dalam pandangan ulama di Indonesia, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan tidak dicatatkan tetap dianggap sah. Yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah terpenuhi unsur

---

<sup>53</sup> “PBNU: Dalam Islam, Anak Luar Nikah tak Berhak Perwalian”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/28/m03uoh-pbnu-dalam-islam-anak-luar-nikah-tak-berhak-perwalian>; diakses tanggal 20 Mei 2019.





tuntutan untuk ditetapkan sebagai anak di luar perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang peradilan agama.<sup>55</sup>

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan, MA memutuskan bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) yang mengabulkan tuntutan tentang status anak di luar kawin dianggap putusan yang menyimpang dari wewenang dan tugas hakim peradilan agama yang harus berpegang pada hukum Islam dalam mengadili dan memutus perkara. Yang dimaksud hukum Islam oleh MA ini adalah ketentuan hukum perkawinan dalam KHI yang merupakan hasil kesepakatan para ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia.

Dengan melihat putusan kasasi ini, terjadi diskrepansi hukum yang ditetapkan MA dengan Putusan MK. Hakim-hakim MA yang memutus perkara tersebut menunjukkan bahwa mereka masih berpegang teguh pada KHI sebagai hukum Islam (syariat) itu sendiri. Ketentuan Hukum yang terdapat dalam KHI dianggap sebagai syariat Islam yang absolut yang tidak bisa diubah karena ketentuan hukum dalam KHI telah disepakati para ulama Indonesia sehingga tidak ada alternatif lain untuk melakukan terobosan hukum. Agar tidak terjadi tumpang

---

<sup>55</sup> Undang-undang peradilan agama telah mengalami dua kali revisi. Undang-undang peradilan agama yang pertama kali diundangkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tahun 2006, undang-undang itu diubah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang hasil perubahan, khususnya Pasal 49, kewenangan pengadilan agama mengalami perluasan, yakni berwenang juga mengadili perkara ekonomi syari'ah. Selanjutnya, pada tahun 2009, undang-undang peradilan agama untuk kedua kalinya diubah. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perluasan kewenangan pengadilan agama dipandang A. Mukti Arto sebagai suatu perkembangan yang luar biasa dalam mengembalikan kompetensinya yang asli sehingga menuju pada peradilan syari'ah yang utuh. Lihat A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 316.

tindih, bahkan diskrepansi hukum, semestinya ketentuan anak luar kawin dalam KHI menyesuaikan dengan putusan yang dikeluarkan MK karena Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lain. Semuanya harus tunduk kepada Putusan MK.

Putusan MA yang menolak pengesahan anak luar kawin hanya menegakkan hukum dengan mengutamakan kepastian hukum saja. Hal itu dapat ditunjukkan dari pertimbangan putusan kasasi, baik dari segi hukum formil maupun materiilnya. Dari segi formilnya, MA secara ketat memutuskan bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili. Putusan seperti ini hanya menegakkan kepastian hukum dalam beracara di pengadilan agama.

Dari segi materiilnya, MA bergeming untuk mempertahankan ketentuan hukum yang sudah mapan berjalan. MA menegaskan bahwa hakim pengadilan agama harus berpegang pada hukum Islam yang tidak lain adalah KHI. Ketentuan persoalan anak luar kawin dalam Pasal 100 KHI sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, padahal MK memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Putusan MK ini seharusnya ketentuan anak luar kawin yang ada dalam KHI tidak diberlakukan sebagaimana undang-undang perkawinan tersebut.

Penegakan hukum dengan hanya mengutamakan kepastian hukum tidak akan mendapatkan keadilan hukum bagi masyarakat, padahal tujuan utama hukum adalah menegakkan kebenaran dan memperoleh keadilan yang pada akhirnya hukum dapat melindungi kepentingan masyarakat. Kepastian hukum memang



Realitas pemahaman para hakim, khususnya, apalagi masyarakat pada umumnya terhadap eksistensi hukum Islam (KHI di Indonesia) berimplikasi pada nasib hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam, dalam hal ini KHI, tidak bisa merespons persoalan-persoalan dan tuntutan kebutuhan umat Islam. KHI masih banyak mengadopsi hasil pemikiran hukum klasik yang bersumber pada teks-teks kitab *madhhab*, di samping menyerap hukum yang berlaku di masyarakat yang mengkristal menjadi hukum adat. Pada saat kemunculannya KHI dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dalam pengembangan hukum Islam dan sebagai puncak perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di samping itu, KHI merupakan terobosan baru untuk mempositifkan hukum Islam, sebagai hukum nasional, meskipun pijakannya hanya sebatas instruksi presiden.

Dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan perkembangan pemikiran hukum Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, KHI menghadapi tantangan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa ketentuan dalam KHI tidak memadai lagi jika dihadapkan pada kebutuhan dan kepentingan sosial. Hukum yang bagus dan baik tidak hanya sekadar memenuhi keadilan prosedural, tetapi mengajukan tawaran yang dapat mengakomodasi kepentingan sosial.

Untuk menghadirkan hukum yang baik, Phillipe Nonet dan Philip Selznik menawarkan hukum responsif, bukan dengan istilah “hukum adaptif”. Istilah responsif dimaksudkan untuk menganjurkan kapasitas adaptasi yang bertanggung





makna lain.<sup>61</sup> Konsep *al-qaṭ'ī* dan *al-zannī* ini berdasar pada makna tekstual dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai universal yang terdapat dalam teks itu. Konsep ini menimbulkan problem karena makna tekstual bersifat kaku dan mengalami kegagalan ketika menghadapi persoalan baru serta cenderung memaksakan maknanya kepada persoalan yang sebenarnya sudah mengalami perubahan.<sup>62</sup> Jika konsep ini dipertahankan, hukum Islam akan mengalami kemandekan dan tidak bisa merespons tuntutan kebutuhan masyarakat. Konsep ini harus bergeser dari pendekatan tekstual kepada substansi yang universal. Konsep *al-qaṭ'ī* merujuk pada nilai-nilai atau prinsip universal dan fundamental, seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan, sedangkan konsep *al-zannī* ditujukan pada hal-hal yang parsial dan teknis, terkait dengan lokalitas dan budaya.

Putusan MK itu juga mempertegas status anak dari kawin hamil dalam Pasal 53 KHI. Memang Pasal 53 KHI tidak menetapkan secara eksplisit status anak dari kawin hamil, tetapi hanya menetapkan kebolehan wanita hamil dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Menurut Yahya Harahap, kebolehan kawin hamil dalam KHI merupakan upaya kompromi dengan hukum adat. Kompromi ini dilakukan karena para ulama sendiri berbeda pendapat tentang kebolehan kawin hamil. Di sinilah dicari jalan tengah dengan membolehkan pria yang menghamili untuk mengawini perempuan hamil di luar nikah. Kebolehan kawin hamil oleh pria yang menghamili dimaksudkan agar anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah

---

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 441-442.

<sup>62</sup> Muhyar Fanani, "Sejarah Perkembangan Konsep Qaṭ'ī-zannī: Perdebatan Ulama tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syari'at", *Al-Jami'ah*, Vol. 39, No. 2 (Juli-Desember, 2001), 456

dengan pria yang mengawini. Tujuan utama asas kebolehan kawin hamil adalah kepastian perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari perempuan hamil di luar nikah. Kebolehan kawin hamil tidak akan membawa masalah yang besar jika anak yang dalam kandungan tetap berkedudukan sebagai anak zina.<sup>63</sup> Formulasi ketentuan kawin hamil dalam KHI yang menyatakan bahwa laki-laki yang menghamili dapat mengawini perempuan hamil di luar nikah tanpa menunggu kelahiran anak dan tanpa perkawinan ulang pascakelahiran anak mengindikasikan anak yang lahir itu menjadi anak sah.<sup>64</sup>

Selama ini umat Islam pada umumnya masih berpegang pada fiqh yang menetapkan bahwa anak dari kawin hamil tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang mengawininya meskipun laki-laki tersebut yang menghamili. Walaupun sudah ada kompromi dalam kebolehan kawin hamil, nampaknya dominasi fiqh klasik masih kuat sehingga KHI tidak merumuskan secara eksplisit kedudukan anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah. Laki-laki yang mengawini perempuan hamil tidak bisa menolak atau mengingkari anak dari perempuan hamil di luar kawin. Kalau terjadi sengketa, yakni pengingkaran anak, tes DNA dapat digunakan. Jika tes DNA membuktikan laki-laki itu mempunyai hubungan darah, anak itu mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang mengawini ibunya.

Meskipun Putusan MK berkenaan dengan status anak yang dilahirkan di luar perkawinan, putusan ini juga mempunyai konsekuensi hukum berkenaan

---

<sup>63</sup> Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 5, Thn III (1992), 47.

<sup>64</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: AMZAH, 2019), 141.





dirinya jika tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut bohong; selanjutnya, (2) istrinya menolak tuduhan suaminya dan atau mengingkarinya dengan menyatakan sumpah sebanyak empat kali bahwa tuduhan zina dan atau pengingkaran terhadap anak. Prosedur li'an seperti itu disebutkan dalam Pasal 127 KHI. Prosedur li'an yang dilakukan oleh suami istri yang meliputi dua hal tersebut harus berkesinambungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Pasal 162 KHI, li'an menyebabkan perkawinan putus untuk selamanya, sedangkan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, kewajiban suami memberi nafkah gugur. Dengan pengingkaran suami akan anak yang dikandung oleh istrinya, anak li'an mempunyai kedudukan yang sejajar dengan anak luar kawin. Sebenarnya anak li'an menempati anak sah karena berada dalam perkawinan yang sah. Namun, kedudukan anak tersebut bergeser karena ada pengingkaran. KHI menyebut secara khusus persoalan anak li'an di samping anak luar kawin.

Anak li'an dinasabkan kepada ibunya karena ibunya yang mengandungnya. Anak li'an tidak dinasabkan kepada suami karena suami tersebut mengingkarinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut sehingga tidak bisa dipastikan apakah anak suami atau bukan. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, anak tersebut bisa diketahui siapa bapaknya. Tes DNA ini bisa dilakukan sebelum anak dilahirkan dengan sampel dari jaringan janin. Kalau ternyata dengan tes DNA diketahui bahwa anak tersebut adalah anak suami, suami tersebut tidak bisa



memisahkan keduanya dan menghubungkan (nasab) anak itu kepada perempuan itu”.

Al-Qura'an dan Hadis Nabi menetapkan li'an sesuai dengan konteks saat itu. Suami yang menuduh istrinya berzina tidak dapat memberikan bukti yang jelas, sedangkan perempuan tersebut menyangkal tuduhan zina. Dengan adanya hubungan suami istri, si suami yang tidak dapat membuktikan tuduhannya tidak dikenakan hukuman *qadhaf*, berbeda dengan orang yang menuduh perempuan lain berbuat zina tanpa ada bukti dikenai hukuman 80 kali dera. Si suami hanya dibebani sumpah li'an karena menuduh tanpa bukti, demikian juga istri yang dituduh dibebani sumpah li'an karena menyangkalnya. Dengan adanya kesulitan pembuktian, anak yang dikandung istrinya jelas merupakan anak darinya karena berada dalam kandungannya atau dilahirkan darinya, sedangkan si suami tidak bisa dipastikan sebagai bapak dari anak itu. Oleh karena itu, Nabi memutuskan untuk menghubungkan anak itu kepada ibunya karena adanya kepastian akan keberadaan anak itu di rahim ibunya.

Jika pada masa Nabi sudah ada ilmu dan teknologi yang bisa membuktikan hubungan darah, seperti tes DNA, pasti Nabi akan memutuskan persoalan itu sesuai dengan bukti yang jelas. Hal itu dapat ditunjukkan pada sikap Nabi yang tidak suka dengan tuduhan zina dan akan menghukum jika tidak bisa mendatangkan saksi. Hanya saja kemudian turun ayat untuk menyelesaikan persoalan pelik itu sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Dengan demikian, ketika ada bukti yang jelas, seperti tes DNA, perubahan ketentuan itu dapat dilakukan dengan berdasarkan bukti tersebut. Jika terbukti dari hasil tes DNA bahwa memang suami itu mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, anak

tersebut ditetapkan sebagai anaknya dan si suami tidak bisa melakukan penyangkalan. Kepastian kebenaran tes DNA lebih kuat daripada pengingkaran. Kedudukan anak li'an secara otomatis berubah menjadi anak sah karena sejak awal anak itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

Dengan berdasarkan pada putusan MK yang menyebutkan pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penelusuran hubungan darah dan kajian terhadap dalil, perubahan ketentuan anak li'an tetap sejalan dengan spirit hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam hal pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, ketentuan anak li'an dalam Pasal 162 KHI diubah agar sesuai dengan perkembangan kondisi, perubahan sosial, dan spirit hukum Islam itu sendiri.

### **C. Perluasan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin**

Putusan MK mengubah kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya berubah ketentuannya, yakni mempunyai hubungan perdata dari dua jalur, dari jalur ibu dan juga jalur bapak biologis. Konsekuensinya, hak-hak keperdataannya juga berubah dan meluas seperti anak sah. Hak-hak tersebut meliputi hak pemeliharaan, hak waris, bahkan hak perwalian. Dengan demikian, ketentuan anak luar kawin dalam KHI berubah sesuai dengan Putusan MK.

#### **1. Hak Pemeliharaan**

Kelahiran seorang anak diiringi dengan lahirnya hak-hak yang akan didapat anak itu selama hidupnya. Tidak mengenal dari manakah anak itu berasal, apakah status yang disandang, dan siapakah orang tua dari anak itu, setiap anak

memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal itu tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. jika dipahami lebih lanjut, hak-hak yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah hak-hak yang dikategorikan sebagai hak pemeliharaan.

Hak pemeliharaan menjadi hak dasar yang wajib diterima oleh setiap anak karena anak yang baru lahir atau masih kecil tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri agar tetap hidup. Anak yang masih kecil atau belum dewasa itu membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemenuhan hak itu dapat diperoleh setiap anak dari orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan anak itu, yakni orang tuanya. Hubungan darah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan, salah satunya mempengaruhi keterikatan hubungan nasab dan keperdataan anak itu dengan orang tua. Hubungan nasab dan keperdataan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi antara anak dengan orang tua.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya akibat adanya hubungan nasab dan hubungan keperdataan itu. Tanggung jawab itu diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban melakukan pemeliharaan kepada anak-anaknya yang berupa pemberian perawatan, pemberian nafkah, pemberian perlindungan, dan pemfasilitasian pendidikan yang layak bagi anak tersebut. Semua itu erat kaitannya dengan

penghidupan yang layak bagi anak itu, baik secara fisik, mental, maupun kecerdasan.

Pemberian penghidupan yang layak kepada anak dilakukan dengan cara kerja sama yang baik antara suami istri yang berperan sebagai orang tua dalam satu keluarga. Adanya pembagian tugas untuk saling melengkapi kebutuhan anak dalam rangka pemenuhan hak pemeliharaan dilakukan oleh kedua orang tersebut sehingga menghasilkan sinergisme dalam satu keluarga itu. Anak tersebut akhirnya dapat menerima hak pemeliharaan yang datang dari kedua orang tuanya secara utuh, baik dari segi pemeliharaan, perawatan, perlindungan, pendidikan, bahkan kasih sayang yang lengkap datang dari kedua orang tua anak itu untuk anak tersebut. Kondisi demikian dapat dirasakan oleh anak yang berasal dari keluarga yang perkawinan orang tuanya tercatat secara resmi dan sah dalam agama dan hukum positif (negara) sehingga timbul hak dan kewajiban akibat adanya hubungan nasab dan keperdataan itu. Namun, kondisi berbeda akan dialami anak yang berasal dari hasil hubungan di luar perkawinan, atau umumnya disebut anak luar kawin.

Dalam KHI Pasal 100, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal itu menyebabkan ibu dari anak tersebut harus menanggung beban seorang diri untuk menghidupi dirinya dan anak itu. Biaya hidup dan pendidikan anak hanya dibebankan kepada ibunya akibat tidak adanya ketentuan dalam KHI yang mengikat laki-laki penyebab lahirnya anak di luar kawin untuk ikut menanggung beban pemeliharaan tersebut. Laki-laki yang

menghamili perempuan itu bebas dari beban pemeliharaan anak. Hal ini jelas merugikan anak luar kawin dan membebani ibu dari anak itu.

Sejak diputuskannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, biaya hidup dan pendidikan anak di luar perkawinan turut dibebankan kepada laki-laki yang terbukti memiliki pertalian darah dengan anak itu atau berikutnya disebut bapak biologis dari anak itu. Pembebanan biaya hidup dan pendidikan anak luar kawin kepada bapak biologisnya itu didasarkan atas timbulnya hubungan keperdataan antara anak dengan laki-laki itu. Dengan adanya hubungan keperdataan itu, kedudukan anak luar kawin untuk mendapat pemenuhan hak-haknya kini telah sejajar dengan anak sah.

Putusan MK yang menimbulkan perubahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan bapak biologisnya itu diterapkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang memiliki muatan materi yang sejalan dengan KHI. Dengan demikian, ketentuan KHI tentang pemeliharaan anak (biaya hidup dan pendidikan) yang diberlakukan kepada anak sah diberlakukan juga kepada anak luar kawin.

## **2. Hak Waris**

Ketentuan kewarisan pada KHI diatur dalam Pasal 171-193. Hak waris-mewaris terjadi jika antara pewaris dan ahli warisnya mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan. Seorang anak yang berasal dari hasil hubungan kedua orang tua yang terikat dalam perkawinan yang sah secara langsung memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya tersebut, baik bapak maupun ibunya. Hal berbeda akan dialami anak yang menyandang status anak luar kawin. Sejak



dilahirkan ke dunia, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal itu tertuang dalam Pasal 100 KHI yang menetapkan bahwa hubungan nasab anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan hubungan nasab hanya kepada pihak ibu, anak luar kawin hanya dapat melakukan hak waris-mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 186 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bapak biologis dari anak luar kawin itu dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan anak itu karena tidak ada ketentuan yang tercantum dalam KHI yang menyebutkan tentang hubungan nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya. Tidak adanya ketentuan saling waris-mewaris menyebabkan anak luar kawin kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli waris dari bapak biologisnya jika bapak biologisnya itu meninggal dunia. Bahkan, harta warisan dari keluarga bapak biologisnya pun tidak bisa didapatkan oleh anak luar kawin itu akibat tidak termuat ketentuan tentang hal itu dalam KHI.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakhiri adanya hubungan nasab anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja menjadi kepada bapak biologis dan keluarga bapak biologisnya juga. Hal ini menjadi awal dimulai terjalannya hubungan nasab dan perdata antara anak yang menyandang status anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan bapak biologis dan keluarga bapak biologisnya itu. Dengan adanya ketentuan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, termasuk keluarga ayahnya, anak tersebut mempunyai hubungan saling mewaris dari dua jalur, dari pihak ibu dan dari pihak ayahnya. Konsekuensinya, Pasal 186 KHI yang menyebutkan, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya” diubah menjadi anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya, termasuk keluarga ayahnya.

### **3. Hak Perwalian**

Hak perwalian dalam Islam erat kaitannya dengan perwalian seorang anak perempuan oleh bapaknya saat anak itu akan menikah. Dalam persoalan wali nikah dalam KHI, sebelum adanya Putusan MK, ditetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, kalau anak tersebut adalah anak perempuan, ketika dinikahkan, walinya adalah wali hakim. Hal itu didasari atas fakta bahwa tidak ada hal sesuatu apa pun yang menghubungkan pertalian antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, sedangkan wali nasab yang menjadi wali nikah baru bisa ditarik hubungannya jika anak perempuan itu mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya.

Wali nasab sebagai wali nikah itu pada dasarnya adalah seorang laki-laki dari garis bapak (jalur kerabat laki-laki) dan memang harus dari garis bapak; tidak bisa dari jalur ibu meskipun seorang laki-laki, seperti ayah dari ibu dan adik laki-laki ibu. Kondisi demikian mendorong perlunya pengajuan wali hakim oleh anak perempuan yang ingin melakukan perkawinan agar perkawinannya itu sah secara

hukum agama dan negara dengan hadirnya wali nikah berupa wali hakim. KHI telah mengatur ketentuan wali hakim tersebut dalam pasal-pasalanya.

Di Indonesia, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali. Pasal 23 (1) menyatakan bahwa wali hakim dapat menjadi wali nikah jika wali nasab tidak ada; sulit mendatangkannya; tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mau. Dengan demikian, anak luar kawin berjenis kelamin perempuan yang ingin menikah tidak akan terhalang perkawinannya akibat hadirnya wali hakim sebagai wali nikahnya.

Meskipun masalah perwalian anak luar kawin bisa dialihkan dengan dihadapkannya wali hakim bagi anak itu sebagai wali nikahnya, tetap saja keberadaan bapak biologis yang berperan sebagai wali nikah di hari bahagia anak perempuannya itu tidak ada yang dapat menggantikan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu memberi jalan bagi seorang bapak biologis untuk menjadi wali nikah dari anak luar kawin hasil perbuatannya. Dalam Putusan MK itu disebutkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologis dan keluarga bapak biologisnya. Adanya hubungan keperdataan ini menandakan bisa ditariknya hak perwalian antara bapak biologis dengan anak luar kawin hasil perbuatannya.

Muatan yang berubah akibat terbitnya Putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu menyebabkan muatan yang tertuang dalam KHI, yang berhubungan dengan hubungan nasab, juga ikut berubah. Ketentuan tentang wali nikah dalam KHI yang diatur dalam Pasal 19-23 sudah selayaknya berlaku juga bagi anak luar





wewenang dengan menggeser posisi *negative legislature* ke *positive legislature*, yakni memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan yang sudah berlaku agar tidak inkonstitusional. Dengan terobosan itu, MK berkontribusi dalam pembangunan hukum responsif dan egaliter. Putusan bukan hanya mengabdikan kepada kepastian hukum (legal-formalistik), tetapi jauh yang lebih penting adalah penegakan substansi hukum (keadilan dan kemanfaatan) yang sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Apa pun isi putusannya, Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Artinya, isi putusan itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh siapa pun di Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1) mempunyai konsekuensi hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam. Hal itu dikarenakan KHI yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama mengatur ketentuan anak luar kawin dan hak keperdataannya sama dengan ketentuan hukum yang ada dalam UU Perkawinan.

Konsekuensi hukumnya adalah perubahan beberapa pasal dalam KHI dan penegasan beberapa pasal lainnya. Pasal-pasal yang disesuaikan dan diubah mencakup kedudukan anak luar kawin, pemeliharaan anak, perwalian anak, kewarisan anak, dan anak li'an, sedangkan pasal-pasal yang diperkuat dan dipertegas melingkupi penetapan asal usul anak dan anak dari kawin hamil. Perubahan ketentuan KHI tersebut tetap sejalan dengan spirit hukum Islam melalui *maqāṣid al-sharī'ah*.

Pengubahan ketentuan yang ada dalam KHI diperlukan untuk mengatasi diskrepansi hukum antara Putusan MK dengan KHI. Adanya diskrepansi hukum ini diperkuat dengan masih diberlakukannya ketentuan anak luar kawin dalam KHI oleh para hakim dalam memutus perkara anak luar kawin pascaputusan MK. Hal ini menunjukkan masih kuatnya dominasi pemikiran hukum klasik di kalangan umat Islam Indonesia sehingga KHI menjadi hukum yang tidak responsif terhadap problem sosial yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Sejatinnya hukum Islam itu selalu sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat melalui perubahan hukum akibat perubahan waktu, tempat, kondisi, dan tradisi. Oleh karena itu, perubahan KHI tentang anak luar kawin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari perubahan itu sendiri dan menjadikan KHI sebagai hukum responsif dan egaliter.

#### **B. Implikasi Teoretik**

Penelitian ini mempunyai implikasi teoretik dalam pengembangan dan perubahan hukum Islam. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah ketentuan hukum Islam yang sudah ditetapkan. Perubahan hukum Islam dengan pertimbangan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya tes DNA untuk menetapkan hubungan nasab, merupakan pengembangan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, adat, dan hal ihwal (تغيير الاحكام بتغيير الزمان والمكان والعوائد والاحوال).

Implikasi teoretik selanjutnya dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan dan perubahan hukum Islam yang dapat memenuhi tuntutan

kebutuhan masyarakat tidak bisa direalisasikan jika tetap mempertahankan teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik yang tidak memasukkan nilai-nilai dasar dan universal, seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, teori *maqāṣid al-sharī'ah* klasik bergeser ke teori *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer, yakni mengacu pada nilai-nilai yang bersifat universal dan fundamental. Dalam hal ini, persoalan hukum anak luar kawin tidak akan berubah ketentuannya jika didekati dengan *maqāṣid al-sharī'ah* klasik. Namun, ketentuan itu dapat berubah dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer yang mengacu pada hal-hal fundamental dan universal.

Sejalan dengan implikasi teoretik di atas, penelitian ini juga memiliki implikasi teoretik bahwa konsep *al-qaṭ'ī* dan *al-ẓannī* yang hanya berdasar pada kajian kebahasaan, yakni *naṣ* atau teks yang mempunyai makna tunggal atau lebih dari satu arti, bergeser kepada konsep *al-qaṭ'ī* dan *al-ẓannī* yang berpijak pada substansi hukum yang universal dan fundamental. Sebenarnya konsep *al-qaṭ'ī* dan *al-ẓannī* ini senafas dengan konsep *al-thawābit wa al-mutaghayyirāt*. *al-Thawābit* berkaitan dengan nilai-nilai fundamental dan universal, sedangkan *al-mutaghayyirāt* menyangkut persoalan-persoalan *juz'iyah* (parsial) dan teknis. Pergeseran-pergeseran tersebut dikenal dengan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*). Pergeseran paradigma dalam teori hukum Islam diperlukan untuk membangun hukum Islam responsif dan egaliter.

### C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya menelusuri dokumen-dokumen dan tidak menggali data di lapangan sehingga ada kelemahan dalam menangkap dan memahami apa



sesungguhnya yang dijadikan pertimbangan para hakim MK memutus perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya persoalan anak luar kawin.

Penelitian ini hanya membatasi pada kajian konsekuensi hukum Putusan MK, tetapi tidak mengkaji lebih komprehensif bagaimana mengatasi terjadinya *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) dengan adanya putusan tersebut dan implementasinya dalam perkara anak luar kawin.

#### **D. Rekomendasi**

1. Dengan keterbatasan penelitian ini, perlu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan yang mempunyai topik serupa dengan memperluas kajian dan pendekatan yang berbeda, misalnya dengan pendekatan sosiologi hukum, antropologi, dan psikologi. Dengan kajian yang lebih luas dan pendekatan yang beragam melalui kajian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif; dapat menjawab persoalan kemanusiaan; dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
2. KHI perlu dilakukan kajian ulang agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dan diformulasi menjadi hukum yang egaliter dan responsif dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan gender sehingga berkontribusi dalam pembinaan hukum nasional.
3. Adanya perubahan ketentuan KHI sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang membuat hukum untuk meningkatkan status KHI yang hanya berbentuk instruksi presiden menjadi



























